

**PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDIP) DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

JAISY MUHAMMAD

1906016073

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) Eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, saya menyatakan bahwa skripsi dari saudara :

Nama : Jaisy Muhammad

NIM : 1906016073

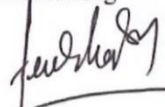
Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Pelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019

Dengan ini telah saya setujui dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 26 Juni 2023
Pembimbing


Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 198511182023211019

SKRIPSI
PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(PDIP) DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

Disusun Oleh


Jaisy Muhammad

1906016073

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 30 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus.

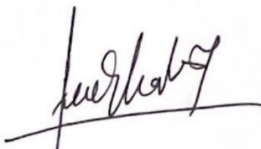
Susunan Dewan Penguji

Ketua




Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

Sekretaris



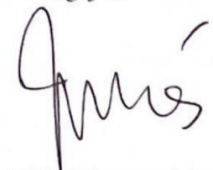
Muhammad Mahsun, M.A

Penguji I



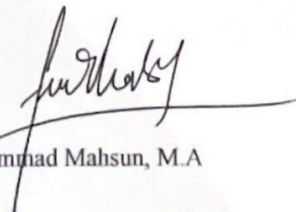
Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

Penguji II



Tika Ifrida Takayasa, M.A

Pembimbing



Muhammad Mahsun, M.A

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Jaisy Muhammad menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan terimakasih.

Semarang, 26 Juni 2023

Yang menyatakan,



Jaisy Muhammad

NIM. 1906016073

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019". Sholawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga dapat menjadi umat yang berakhlakul karimah dan memiliki pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa bagi penulis dan hasil akhir selama mengikuti proses perkuliahan di program studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran selama menjadi mahasiswa, dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, serta nasehat selama penulis menimba ilmu pada program studi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M.A yang telah memberikan dukungan dan berbagai ilmu kepada penulis dalam perkuliahan.

4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun, M.A yang juga selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak ilmu, arahan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga penulis mampu mengimplementasikan ilmu yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap jajaran tenaga pendidik dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu penulis dalam memenuhi segala kebutuhan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak H. Mustofa selaku informan utama dalam penelitian yang penulis lakukan dan telah mengizinkan dan memberikan berbagai informasi kepada penulis serta bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
8. Segenap narasumber yang bersedia dijadikan informan pendukung yang turut memberikan berbagai informasi kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Arif Rahman dan Ibu Dian Damayanti, adik tercinta Zidni Ilman, Saffanah Amaturahman dan Ahmad Luthfan, yang telah memberikan doa, cinta, kasih sayang, serta dukungan baik dari segi moral maupun material yang tidak terhingga kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Semoga kedua orang tua dan keluarga penulis selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan umur panjang.

10. Seluruh keluarga besar penulis, keluarga “Bani Wahid dan Birrul Walidayn” yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Semoga seluruh keluarga penulis diberikan kesehatan, panjang umur, dan hidup yang berkah.
11. Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) yang sudah mendukung melalui program Bantuan Riset Talenta dalam menyelesaikan tugas akhir atau skripsi penulis.
12. Rekan-rekan Ilmu Politik C dan seluruh rekan prodi Ilmu Politik 2019 yang telah memberikan canda tawa dan semangat bagi penulis, Semoga Allah meridhoi langkah kita menuju sukses.
13. Teman seperjuangan penulis, Ilham Citra Mulyawan, Fahri Danu Aji, M. Subarkah, Dheas Ananda, Farras Zaky, Ganung Ringganing Putra, Faris Balya, Bintang Gimnastiar, Bayu Rifqi, Ilham Aqila, Della Ayu, Yanwar Pratama dan seluruh teman-teman yang lain, terima kasih telah menemani hari-hari penulis selama menjalani kehidupan rantauan di Semarang maupun di luar sana. Semoga ikatan pertemanandan tali silaturahmi ini dapat terus terjalin selamanya dan sukses untuk kalian semua.
14. Rekan-rekan Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) FISIP, DEMA UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkembang, belajar, dan berproses bersama dalam satu wadah organisasi sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu dan pengalaman yang berharga.
15. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur penulis ucapkan terima kasih.

Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat penulis butuhkan agar skripsi ini dapat

meningkatkan kualitas dan dapat berguna bagi para pembaca. Akhir kata penulis sampaikan terimakasih atas perhatiannya.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirahim

Dengan segala syukur dipanjatkan pada Allah SWT Tuhan semesta alam dan tidak ada yang mampu menandingi kekuatan serta kekuasaannya.

Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak Arif Rahman dan Ibu Dian Damayanti yang telah berjuang keras memperjuangkan pendidikan anaknya dan tidak pernah berhenti dalam memanjatkan do'a-do'a yang terbaik untuk anaknya.

Untuk dosen pembimbing Bapak Muhammad Mahsun yang telah memberikan segala ilmu dan bimbingan serta motivasi.

Do'a untuk almamater tercinta Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang sudah menjadi tempat bagi saya untuk belajar dan bekal untuk menjadi pegangan kesuksesan saya dimasa depan.

MOTTO

*“Perlu kompas dalam berkehidupan. Salah satunya adalah akal sehat. Kadang harus
lawan arus, tapi batin tenang”*

~Jaisy Muhammad

ABSTRAK

Pemilu 1999 tercatat sebagai momen sejarah yang mengalihkan fokus upaya politik pada perubahan partai peserta demokrasi, sehingga jumlah partai peserta pemilu saat itu lebih banyak dari pemilu pada masa orde baru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) merupakan partai besar di Indonesia yang selalu meraih banyak suara dalam setiap pemilu. Akan tetapi, PDI-Perjuangan mengalami penurunan suara untuk pertama kalinya pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon setelah beberapa kali menjadi pemenang pemilu. Sehingga momentum penurunan suara tersebut menjadi pintu masuk analisis penelitian ini yang bertujuan untuk melihat bagaimana proses pelebagaan PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon selama lima tahun terakhir (2014-2019).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada bagaimana proses pelebagaan partai politik diukur menggunakan teorisasi Randall dan Svasand di tingkat lokal khususnya pada Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kabupaten Cirebon. Data penelitian ini diperoleh dari wawancara mendalam dan sumber literatur seperti dokumen terkait pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kabupaten Cirebon.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kabupaten Cirebon pada tiap dimensi pelebagaan partai yang dianalisis berdasarkan teorisasi Randall dan Svasand masih rendah. Pertama, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Meski begitu, dalam beberapa keputusan yang bersifat urgen dan strategis level DPC tidak mempunyai kewenangan dalam memutuskan. Selain itu, dari segi kesolidan partai PDI-Perjuangan cukup solid dibuktikan dengan tidak adanya faksionalisme didalam internal. Kedua, upaya PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dalam menanamkan identitas nilai atau ideologi marhaenisme. Hasil membuktikan dengan kuatnya basis sosial yang loyal terhadap partai yang didominasi oleh kaum wong cilik seperti buruh, tani, nelayan, pedagang kecil dan lain sebagainya. Namun, ideologi atau platform yang diusung oleh PDI-Perjuangan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Ketiga, kemandirian pengambilan keputusan dan kemandirian keuangan berjalan dengan baik karena selalu mengedepankan gotong royong. Namun, pendanaan yang mengandalkan iuran dari beberapa orang tertentu saja (tiga pilar partai) membuat kader di tingkat bawah atau *grass root* tidak memiliki peran utuh dalam merumuskan suatu kebijakan. Keempat, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon ideologi atau nilai yang diusung PDI-Perjuangan sudah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Namun demikian, upaya yang sudah dibangun dalam menampilkan citra baik partai serta menanamkan nilai dan ideologi partai kepada masyarakat harus dirusak oleh kasus hukum yang menimpa kader PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon itu sendiri.

Kata Kunci: Partai politik, Pelebagaan partai, Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kabupaten Cirebon

ABSTRACT

The 1999 election was recorded as a historical moment that shifted the focus of political efforts to changing the parties participating in democracy, so that the number of parties participating in the election at that time was more than the elections during the New Order era. The Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-Perjuangan) is a major party in Indonesia which always wins many votes in every election. However, PDI-Perjuangan experienced a decline in votes for the first time in the 2019 legislative elections in Cirebon Regency after winning the election several times. So that the momentum of the vote reduction became the entry point for the analysis of this research which aims to see how the process of institutionalizing the PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon over the past five years (2014-2019).

This research is a qualitative research with a case study approach that focuses on how the process of institutionalization of political parties is measured using the theorization of Randall and Svasand at the local level, especially in the Indonesian Democratic Party-Struggle for Cirebon Regency. The data for this research were obtained from in-depth interviews and literature sources such as documents related to the institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle in Cirebon Regency.

The research results show that the level of institutionalization of the Indonesian Democratic Party of Struggle in Cirebon Regency in each dimension of party institutionalization as analyze based on Randall and Svasand's theory is still low. First, PDI-Perjuangan Cirebon Regency uses a consensus deliberation mechanism in decision making. However, in several urgent and strategic decisions, the DPC level does not have the authority to decide. Apart from that, in terms of the solidarity of the PDI-Perjuangan party, it is quite solid, proven by the absence of internal factionalism. Second, the efforts of the PDI-Perjuangan Cirebon Regency to instill an identity of marhaenism values or ideology. The results prove the strong social base that is loyal to the party which is dominated by small people such as workers, farmers, fishermen, small traders and so on. However, the ideology or platform promoted by PDI-Perjuangan has not been able to reach all levels of society. Third, decision-making independence and financial independence work well because mutual cooperation is always prioritized. However, funding that relies on contributions from only certain people (the three pillars of the party) means that cadres at the lower level or grass roots do not have a complete role in formulating a policy. Fourth, the PDI-Perjuangan Cirebon Regency ideology or values promoted by the PDI-Perjuangan have a special place in the hearts of the people. However, the efforts that had been made to present a good image of the party and instill the party's values and ideology in the community had to be damaged by the legal case that befell the Cirebon Regency PDI-Perjuangan cadres themselves.

Keywords: Political parties, Party institutionalization, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Tinjauan Pustaka.....	7
1. Dominasi PDI-Perjuangan	8
2. Faktor Kekalahan Partai Dalam Pemilu.....	9
3. Pelembagaan Partai Politik	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sumber dan Jenis Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II.....	17
PARTAI POLITIK DAN PELEMBAGAAN PARTAI	17
A. Partai Politik	17
B. Pelembagaan Partai Politik	20
BAB III	26

LANDSCAPE KABUPATEN CIREBON	26
DAN PROFIL PDI-PERJUANGAN DI KABUPATEN CIREBON	26
A. Kondisi Geografis Kabupaten Cirebon.....	26
B. Penduduk Kabupaten Cirebon	27
C. Pemerintahan Kabupaten Cirebon	30
D. Sejarah Lahirnya PDI-Perjuangan	34
E. Ideologi PDI-Perjuangan.....	36
F. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon	37
G. Dinamika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon	41
BAB IV	43
ANALISIS DIMENSI KESISTEMAN DAN IDENTITAS NILAI PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019	43
A. Dimensi Kesisteman	43
1. Demokrasi Internal	43
2. Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai.....	47
3. Kesolidan (Keutuhan) Partai.....	50
B. Dimensi Identitas Nilai	52
1. Basis Dukungan Partai.....	53
BAB V.....	57
ANALISIS DIMENSI OTONOMI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN CITRA PUBLIK PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019	57
A. Dimensi Otonomi Pengambilan Keputusan	57
1. Otonomi Keuangan	57
2. Otonomi Pengambilan Keputusan	59
B. Dimensi Pengetahuan (Citra) Publik	62
1. Kiprah Partai dalam Politik Lokal	63
2. Kiprah Partai di Masyarakat	65
BAB VI	70
PENUTUP.....	70

A. KESIMPULAN	70
B. SARAN DAN REKOMENDASI.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2003-sekarang	3
Tabel 2. 1 Dimensi Pelembagaan Partai Randall dan Svasand.....	21
Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon.....	28
Tabel 3. 2 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2021 dan 2022	32
Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2021 dan 2022.....	33
Tabel 3. 4 Penjelasan Struktur Partai Demokrasi di Indonesia Perjuangan	37
Tabel 3. 5 Struktur, Komposisi & Personalia	38
Tabel 3. 6 Daftar Organisasi Sayap.....	39
Tabel 3. 7 Daftar Organisasi Badan	40
Tabel 4. 1 Jenjang Kaderisasi Partai	48
Tabel 5. 1 Peristiwa Kasus Hukum	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perolehan Suara Nasional PDIP 1999-2019 (%).....	2
Gambar 1. 2 Perolehan Suara PDIP Kab. Cirebon 1999-2019 (%)	4
Gambar 1. 3 Hasil Perolehan Suara Pileg 2019 Kab. Cirebon (%).....	4
Gambar 3. 1 Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Cirebon	27
Gambar 3. 2 Persentasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon 2022.....	31

BAB I

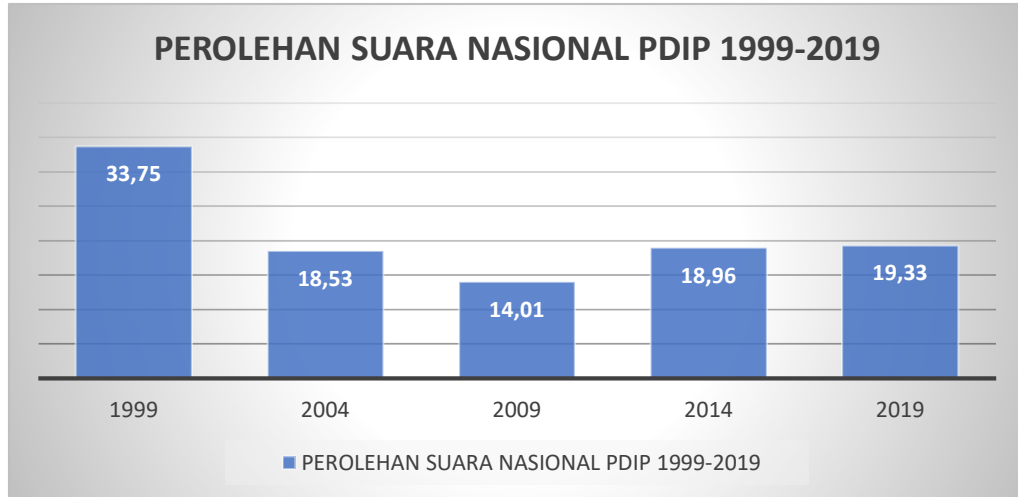
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pada masa reformasi, desakan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan lahir melalui Amandemen UUD 1945. Hal ini berawal dari adanya tuntutan di hampir seluruh penjuru Indonesia untuk menumbangkan rezim orde baru dengan melakukan tekanan politik berlandaskan semangat mereformasi sistem pemerintahan. Rezim orde baru juga dinilai telah gagal mengatasi krisis dan penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Munawar, 2022).

Pemilu 1999 tercatat sebagai momen sejarah yang mengalihkan fokus upaya politik pada perubahan partai peserta demokrasi, sehingga jumlah partai peserta pemilu saat itu lebih banyak dari pemilu pada masa orde baru. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan) merupakan partai besar di Indonesia yang selalu meraih banyak suara dalam setiap pemilu. Pada pemilu 1999, PDI-Perjuangan meraih 33,75 persen suara nasional dan mendapat 153 kursi di DPR-RI (KPU, 2011). Berkat capaian suara tersebut, PDI-Perjuangan menjadi partai pemenang dalam pemilu saat itu. Pada perjalanan pemilu dari tahun 1999-2019, PDI-Perjuangan mengalami pasang surut perolehan suara. Dalam dua pemilu terakhir, yakni pada 2014 dan 2019, PDI-Perjuangan berhasil meraih suara nasional terbanyak (Djojosoekarto & Sandjaya, 2008).

Gambar 1. 1 Perolehan Suara Nasional PDIP 1999-2019 (%)



Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan rilis data KPU

Kemenangan PDI-Perjuangan secara nasional berbanding lurus dengan hasil yang dicapai di daerah. Sejak era reformasi, PDI-Perjuangan merupakan partai pemenang pemilu di Kabupaten Cirebon. Dalam beberapa kali kontestasi pemilu, perolehan suara PDI-Perjuangan menempati urutan satu dan selalu mendapat perolehan kursi di DPRD diatas 10 kursi. PDI-Perjuangan juga berhasil menempatkan kadernya sebagai Kepala Daerah. Pada tahun 2018, diselenggarakan Pemilukada di Kabupaten Cirebon. Pemilihan ini dimenangkan pasangan calon Sunjaya Purwadi Sastra dan Imron Rosyadi yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2018-2023 yang diusung oleh koalisi tunggal PDI-Perjuangan. Kemenangan ini menegaskan kembali dominasi PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon setelah sebelumnya sejak tahun 2003 posisi Bupati atau Wakil Bupati Cirebon dijabat oleh kader yang berasal dari PDI-Perjuangan.

Tabel 1. 1 Daftar Bupati dan Wakil Bupati Cirebon 2003-sekarang

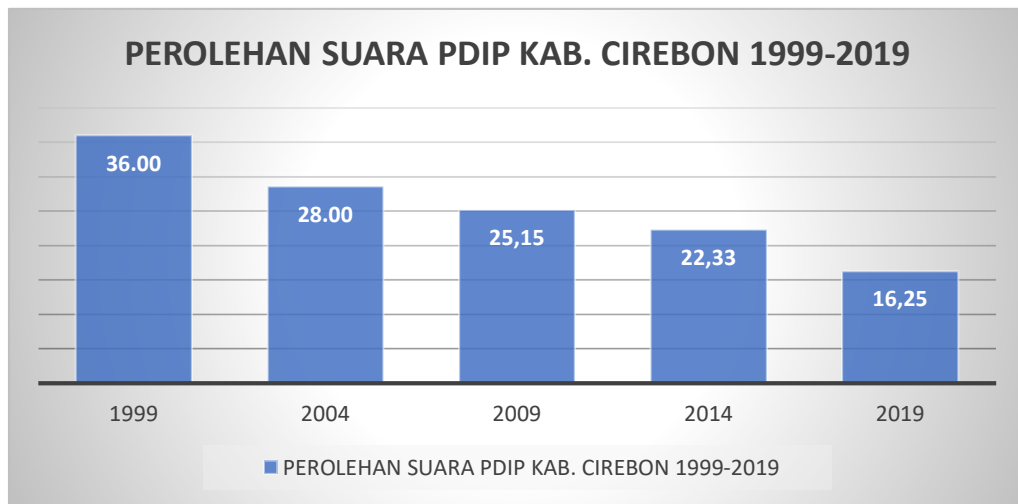
Bupati	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil Bupati	Partai Pengusung
Drs. H. Dedi Supardi M.M.	10 Desember 2003	10 Desember 2008	Nur Asyik H. Syarif	PDI-P dan PPP
	10 Desember 2008	10 Desember 2013	Ason Sukasa	PDI-P dan Golkar
Dr. H. Sunjaya Purwadi Sastra, M.M., M.Si.	19 Maret 2014	25 Oktober 2018	Tasiya Soemadi (2014-2017) Selly Andriani Gantina (2017-2018)	PDI-P
	17 Mei 2019	17 Mei 2019	Imron Rosyadi	PDI-P
Drs. H. Imron Rosyadi, M.Ag.	17 Mei 2019	<i>Petahana</i>	Wahyu Tjiptaningsih	

Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan rilis data KPU

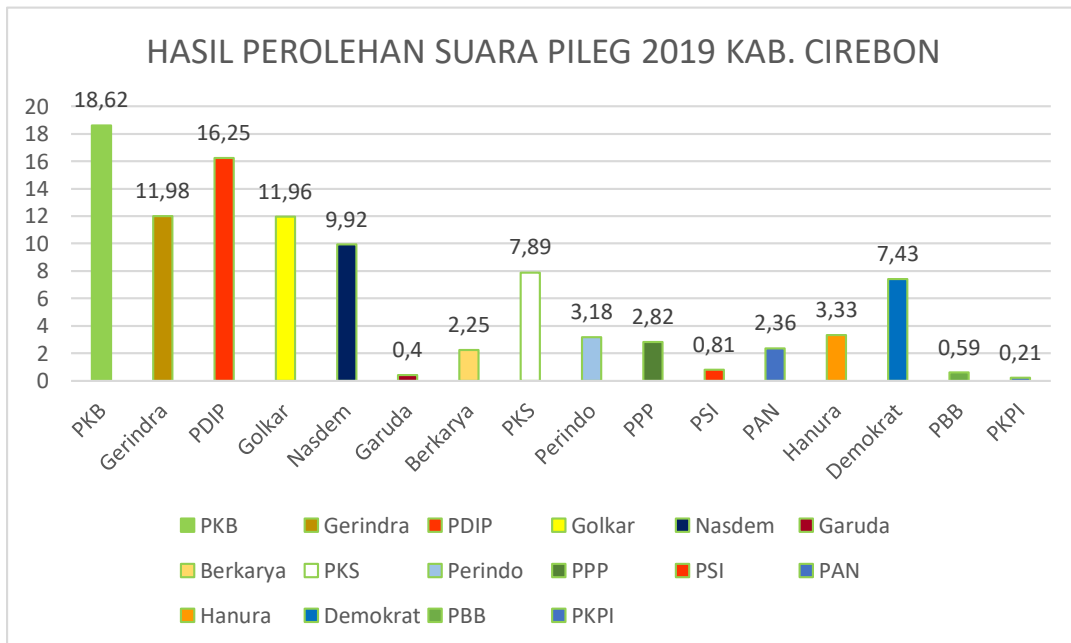
Akan tetapi, PDI-Perjuangan mengalami penurunan suara untuk pertama kalinya pada pemilu legislatif 2019. Hasil perolehan suara di Kabupaten Cirebon dimenangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berhasil menyalip posisi PDI-Perjuangan dan keluar sebagai pemenang pemilu. Kemenangan PKB ini sekaligus menyudahi dominasi kekuasaan PDI-Perjuangan pada tingkat legislatif selama dua puluh tahun di Kabupaten Cirebon. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menganalisis mengapa suara PDI-Perjuangan mengalami penurunan suara pada pemilu

legislatif 2019. Data dibawah menunjukkan hasil perolehan suara pemilu legislatif PDIP dari tahun 1999-2019.

Gambar 1.2 Perolehan Suara PDIP Kab. Cirebon 1999-2019 (%)



Gambar 1.3 Hasil Perolehan Suara Pileg 2019 Kab. Cirebon (%)



Sumber : Diolah oleh penulis berdasarkan rilis data KPU

Kajian yang membahas kekalahan atau penurunan suara sebuah partai dalam kontestasi pemilu telah banyak dilakukan oleh banyak sarjana sebelumnya. Sebagian sarjana telah mengkaji kekalahan sebuah partai politik dengan berbagai perspektif yang dianalisis menggunakan pendekatan *historical institutionalism*, teori *Dominant Party Authoritarian Regimes*, serta teori perubahan partai (Riyanto, 2020; Fajari, 2017; Trianisa, 2021). Adapun terkait dengan studi PDI-Perjuangan secara khusus, beberapa tulisan telah berupaya mengkaji kekalahan PDI-Perjuangan baik ditinjau dari segi hukum, perilaku pemilih dan komunikasi politik yang melihat efek domino yang terjadi setelah penetapan kadernya terjerat masalah hukum, perilaku pemilih yang dipengaruhi oleh budaya lokal dan strategi komunikasi politik yang dilakukan saat kampanye (Ekawati, 2017; Nuryani dan Harsasto, 2018; Fajri dan Fadillah, 2017; Afriandi, 2022).

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan, perbedaannya yaitu terletak pada fokus kajian. Penelitian ini menggunakan momentum penurunan suara PDI-Perjuangan pada pemilu 2019 di Kabupaten Cirebon sebagai pintu masuk analisis kajian penelitian ini. Penulis memfokuskan kajian dengan menganalisis dari sisi pelebagaan PDI-Perjuangan. Sehingga penelitian ini lebih fokus mengkaji bagaimana proses institusionalisasi atau pelebagaan partai yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon selama tahun 2014-2019. Institusionalisasi atau pelebagaan merupakan proses dimana organisasi mengambil langkah-langkah untuk memperoleh nilai baku dan stabil (Huntington, 2003). Selain itu, pelebagaan di definisikan sebagai proses sebuah partai politik menjadi stabil dalam hal pola perilaku, sikap dan budaya yang tertanam (Katz dan Crotty, 2014).

Partai politik berperan sebagai alat bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka kepada pemerintah. Oleh karena itu, partai politik perlu memperoleh kepercayaan dan keyakinan dari masyarakat. Untuk mencapai hal ini, partai politik perlu memiliki struktur dan sistem yang baik melalui proses pelebagaan yang solid. Ketika proses pelebagaan partai politik di dalam sebuah partai telah stabil dan efektif,

hal ini akan berdampak positif dalam kegiatan politik. Proses pelebagaan partai melibatkan penguatan struktur dan budaya internal partai itu sendiri.

Untuk menganalisis pelebagaan PDI-Perjuangan ini, ada 4 dimensi kesisteman yang menjadi fokus analisis derajat pelebagaan partai politik sesuai teorisasi Randall dan Svasand. *Pertama*, dimensi kesisteman (*systemness*), yaitu dimensi ini menjelaskan fungsi partai politik (fungsi sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, pemadu kepentingan, kontrol politik, manajemen konflik dan komunikasi politik). *Kedua*, dimensi identitas nilai (*value infusion*), yakni dimensi ini terkait dengan identitas ideologi partai politik. *Ketiga*, dimensi otonomi (*decisional autonomy*), yaitu dimensi suatu partai dalam pengambilan keputusan. *Keempat*, dimensi citra publik (*reification*), yaitu dimensi citra publik sebuah partai politik.

Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk membantu menjelaskan tentang dinamika kepartaian di tingkat lokal Indonesia. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bahwa pada proses pelebagaan partai politik hingga peristiwa perubahan institusional dalam tubuh partai dapat mempengaruhi kemapanan sebuah partai dalam jalur kelebagaannya.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi pelebagaan partai PDI-Perjuangan selama 5 tahun terakhir ditinjau dari dimensi kesisteman dan dimensi identitas nilai (2014-2019)?
2. Bagaimana kondisi pelebagaan partai PDI-Perjuangan selama 5 tahun terakhir ditinjau dari dimensi otonomi keputusan dan dimensi citra publik (2014-2019)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat pelebagaan partai PDI-Perjuangan tahun 2014-2019 ditinjau dari dimensi kesisteman dan dimensi identitas nilai.
2. Untuk mengetahui tingkat pelebagaan partai PDI-Perjuangan tahun 2014-2019 ditinjau dari dimensi otonomi keputusan dan dimensi citra publik.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat berkontribusi atau sumbangsih dalam ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai bahan referensi dalam studi selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan saran dan informasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan atau membutuhkan khususnya lembaga maupun instansi pemerintahan.
 - b. Diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan catatan bagi PDI-Perjuangan guna keberlangsungan dan proses pelebagaan partai politik pada kontestasi pemilu berikutnya.
 - c. Diharapkan dapat memberikan pemahaman seputar pelebagaan partai politik di tingkat lokal khususnya PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yakni penelitian yang dilakukan sebelum penulis dan dijadikan sebagai rujukan tinjauan pustaka dari artikel jurnal yang berkaitan dengan pelebagaan PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019. Tujuan tinjauan pustaka yaitu guna mengetahui kesamaan penelitian yang diteliti dan mencari informasi dari penelitian sebelumnya guna menemukan perbedaan. Literatur pada tinjauan pustaka ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu : *Pertama*, kajian mengenai

dominasi PDI-Perjuangan secara umum. *Kedua*, kajian mengenai faktor kekalahan sebuah partai dalam pemilu. *Ketiga*, kajian mengenai dimensi pelebagaan sebuah partai politik.

1. Dominasi PDI-Perjuangan

Literatur yang membahas tentang Dominasi PDI-Perjuangan terdiri dari empat artikel jurnal yaitu kajian oleh Pebriana (2019), Santoso (2020), Novianawati (2016) dan Alam (2017). Sepanjang pemilu setelah runtuhnya Orde Baru, PDI-Perjuangan berhasil muncul sebagai partai dominan di Bali tidak terlepas dari keberhasilan memanfaatkan modal simbolik masa lalu sebagai partai Soekarno, sukses membangun sistem aliansi dengan berbagai kelompok masyarakat yang memberi dukungan politik, serta berhasil memperbaharui sistem pengorganisasian partai (Pebriana, 2019).

Penelitian oleh Santoso (2020) juga menunjukkan bahwa PDI-Perjuangan di Kota Surakarta memenuhi syarat konsep dominasi O'Leary sehingga PDI-Perjuangan secara konsisten memenangkan kampanye pemilu yang ada di Kota Surakarta.

Sejak pemilu legislatif pada 2004-2014, PDI-Perjuangan berhasil mendominasi perolehan suara di Kabupaten Tulungagung. Banyak anggota DPRD dari PDI-Perjuangan yang terpilih kembali untuk beberapa kali masa jabatan dan telah membangun kultur senioritas sehingga dapat menguasai jajaran DPRD. Kekuasaannya di setiap forum dapat membawa PDI-Perjuangan membuat banyak kebijakan serta keberpihakan keputusan pada setiap jajaran. Kemenangan ini juga yang kemudian membuat PDI-Perjuangan mendominasi DPRD karena memiliki anggota lebih banyak dari partai lain untuk mengisi posisi strategis (Novianawati, 2016).

Kemudian faktor yang mempengaruhi eksistensi dan dominasi PDI-Perjuangan di Kota Blitar adalah *Pertama*, faktor sejarah kehidupan mantan Presiden Soekarno sebagai tokoh besar di Kota Blitar. *Kedua*, jenis perilaku pemilih berpengaruh kuat terhadap raihan elektoral PDI-Perjuangan di Kota Blitar. *Ketiga*, terdapat aparatur

partai yang diorganisir untuk memenangkan suara dalam pemilihan umum (Alam, 2017).

2. Faktor Kekalahan Partai Dalam Pemilu

Kelompok literatur kedua terdapat empat artikel jurnal yang membahas faktor-faktor penentu kekalahan partai dalam pemilu yaitu penelitian oleh Trianisa (2021), Putriwani (2021), dan Afriandi (2021). Menurut Trianisa (2021), faktor penyebab kekalahan sebuah partai disebabkan oleh perubahan faksi dominan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan faktor menurunnya perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2019 dikarenakan terjadinya perubahan faksi dominan di dalam tubuh Partai Demokrat yang mengakibatkan mesin partai tidak berfungsi maksimal akibat hilangnya kader-kader potensial dan kondisi internal partai yang berdiri atas monopower, sehingga kekuatan partai kurang menarik perhatian masyarakat.

Selanjutnya Putriwani (2021) dalam penelitiannya menjelaskan beberapa faktor penyebab kekalahan politisi petahana pada pemilu 2019, antara lain : ketidakpuasan publik terhadap kinerja petahana, perubahan perilaku masyarakat, perpecahan internal partai, tim sukses tidak bekerja secara profesional dan kurangnya transparansi penyelenggara terhadap proses pemilu.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Afriandi (2021) menemukan bahwa rendahnya jumlah pemilih PDI-Perjuangan menunjukkan ketidakpopuleran partai tersebut di Sumatera Barat. PDI-Perjuangan dinilai kurang peka terhadap karakter masyarakat Minangkabau, serta karakter dan kebijakannya tidak disukai masyarakat. Demikian pula, buruknya *track record* PDI-Perjuangan mengakibatkan Joko Widodo hanya mendapat sedikit suara di Sumatera Barat pada Pilpres 2014 dan 2019.

3. Pelembagaan Partai Politik

Kelompok literatur terakhir membahas pelembagaan partai politik yang terdiri dari lima artikel jurnal yaitu penelitian oleh Gaol dkk (2021), Setiadi (2019), Suryana

dkk (2020), Prihatmoko (2022) dan Syafridho (2022). Menurut Gaol dkk (2021), PDI-Perjuangan menerapkan sistem demokrasi di internal partai dengan model terpimpin, dimana ketua umum memiliki kewenangan khusus untuk menentukan bentuk dan tata cara pengelolaan demokrasi internal yang dijamin dalam piagam partai, AD/ART partai; rekrutmen calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah tidak dilakukan secara demokratis sesuai dengan prinsip demokrasi liberal, karena keputusan mutlak berada di tangan ketua umum partai.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2019) menunjukkan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kendal telah berhasil membangun pelebagaan partai yang baik dalam pemilihan umum tahun 2019, yang diukur berdasarkan teori pelebagaan partai yang dikembangkan oleh Randall dan Svavand. Beberapa indikator keberhasilan dan kegagalan PKB Kabupaten Kendal dalam membangun pelebagaan tersebut adalah sebagai berikut: Pertama, dalam sistem demokrasi partai, PKB Kabupaten Kendal menerapkan mekanisme musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, partai ini selalu mengedepankan platform partainya. Ketiga, PKB Kabupaten Kendal berhasil menjalin sinergi dengan jaringan sayap partai dan basis dukungan yang dimilikinya. Keempat, secara kelembagaan, PKB Kabupaten Kendal memiliki basis pendukung yang kuat. Namun, terdapat juga kekurangan dalam pelebagaan PKB Kabupaten Kendal, yaitu kurangnya kemandirian keuangan yang optimal.

Kemudian penelitian tentang pelebagaan partai politik dilakukan oleh Suryana dkk (2020) menunjukkan bahwa derajat kesisteman (*systemness*) dalam proses pelebagaan partai pada PSI Kota Bandung belum maksimal. PSI Kota Bandung belum mampu menerjemahkan aspek seperti penggunaan aturan, prosedur, dan mekanisme yang disepakati dan ditentukan untuk mengelola organisasi. Pada tataran derajat identitas nilai (*value infusion*), PSI Kota Bandung senantiasa mengusung nilai-nilai yang menjadi identitas partai. Narasi dan isu yang dihadirkan partai membuat mereka diterima oleh golongan minoritas elektoral, baik dari kelompok agama maupun

etnis. Namun, dalam praktiknya sebagian narasi yang digaungkan partai tidak menciptakan insentif elektoral yang nyata. Pada tataran *decisional autonomy*, kondisi pendanaan partai PSI Kota Bandung semata-mata bergantung dari sumber internal. Meskipun kondisi ini memberikan fleksibilitas dan derajat otonomi suatu partai dalam pengambilan keputusan, kapasitas keuangan yang terbatas mempengaruhi efektifitas jalannya organisasi. Pada tataran *reification*, pembedaan keragaman identitas yang diusung partai nampaknya belum menjangkau seluruh masyarakat Kota Bandung.

Menurut Prihatmoko (2022), dalam penelitiannya mengulas strategi pemenangan dan pelebagaan partai politik dalam merekrut calon dari PDIP di 21 kabupaten/kota pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekrutmen calon PDIP dalam pemilihan serentak tersebut lebih ditekankan sebagai bagian dari strategi pemenangan daripada pelebagaan partai. Berdasarkan konsep Adman Nursal, ditemukan tujuh pola rekrutmen yang mendasarkan pada empat strategi, yaitu penguatan, rasionalisasi, bujukan, dan konfrontasi. Dari perspektif pelebagaan partai berdasarkan konsep Vicky Randall dan Lars Svasand, terlihat bahwa partai PDIP memiliki dorongan yang kuat sebagai "partai mengambang" yang ditunjukkan melalui aspek kesisteman, identitas nilai, otonomi dalam pembuatan keputusan, dan pengetahuan atau citra publik terhadap partai politik tersebut. Pola rekrutmen PDIP dalam pemilihan kepala daerah terlihat tertutup namun memberikan kesan terbuka, yang mengonfirmasi keberadaan "partai mengambang" yang kurang bertanggung jawab dan kurang responsif terhadap konstituen. Namun, dalam konteks massa yang kurang teredukasi secara politik, calon-calon dari PDIP berhasil memenangkan mayoritas pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 di Jawa Tengah.

Dalam penelitian terakhir yang dilakukan oleh Syafridho (2022), menggunakan teori pelebagaan partai yang dikembangkan oleh Matthias Basedau dan Alexander Stroth, mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan penurunan suara Partai Hanura pada pemilihan legislatif 2019 di Kota Padang. Penelitian ini menemukan

bahwa pada tingkat akar rumput, Partai Hanura kurang populer di kalangan masyarakat Kota Padang. Selain itu, dalam dimensi kekuatan organisasi, partai ini mengalami minimnya partisipasi kader atau anggota dalam berbagai kegiatan partai. Selanjutnya, dalam dimensi koherensi, banyak kader senior yang memilih untuk mundur dari partai. Beberapa faktor lain yang turut berperan dalam penurunan suara Partai Hanura adalah rekrutmen calon legislatif yang baru dalam dunia politik dan kurang dikenal oleh masyarakat, pengaruh dari dukungan Partai Hanura terhadap pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilihan Presiden 2019, serta kepemimpinan pengurus partai yang tidak mampu memberikan dukungan dan inklusi kepada para kader partai.

Dari tinjauan pustaka yang dilakukan di atas terlihat bagaimana faktor dari dominasi dan kekalahan sebuah partai. Akan tetapi, dari pola yang terlihat pada penelitian sebelumnya, pelaksanaan proses pelebagaan partai belum dijabarkan secara komprehensif dan rinci untuk menjelaskan faktor dari kekalahan atau penurunan suara sebuah partai dalam kontestasi pemilu. Penulis menganalisa bahwa konsep pelebagaan partai dapat menjadi topik yang relevan dalam studi tentang kepartaian. Suatu partai politik haruslah ditopang oleh pelebagaan struktur yang kuat. Oleh karena itu, untuk memperkaya penelitian di atas, penulis memfokuskan tentang pelebagaan PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya pada topik yang sama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang bertujuan menyelidiki secara intensif mengenai interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan secara apa adanya (Suyitno, 2018). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif dan umumnya menggunakan analisis. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, yaitu

pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap beberapa gejala tertentu (Arikunto, 2002). Melalui jenis dan pendekatan ini peneliti berusaha mengkaji pelebagaan PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 secara mendalam dan sistematis.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah semua informasi dan data yang digunakan dalam penelitian. Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui subjek penelitian atau informan (Wekke, 2019). Data primer penelitian ini berasal dari fungsionaris DPC PDI-Perjuangan maupun kader PDI-Perjuangan Kab. Cirebon.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak didapat secara langsung oleh peneliti, melainkan melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013). Data sekunder untuk penelitian ini yaitu meliputi buku, artikel jurnal, serta dokumen lain yang terkait dengan penelitian ini seperti dokumen AD/ART partai, risalah rapat, hasil pemilu dan teori yang diterapkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan dua jenis teknik untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Wawancara

Stewart dan Cash dalam Wekke (2019) menjelaskan wawancara sebagai suatu interaksi yang di dalamnya terjadi pertukaran informasi secara mendalam antara pewawancara dengan informan. Jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah semi terstruktur agar

persoalan yang diteliti lebih terbuka. Peneliti akan melakukan wawancara dengan teknik *snowball*, yaitu peneliti akan mewawancarai satu atau dua informan di awal, namun jika data belum lengkap maka akan dilakukan wawancara dengan informan selanjutnya (Sugiyono, 2013). Informan dalam penelitian ini yaitu para pengurus DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon. *Key informant* atau informan kunci merupakan informan yang dipercaya dapat membukakan pintu menuju objek penelitian (Sugiyono, 2013). *Key informant* dalam penelitian ini yaitu Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon. Informan pendukung merupakan informan yang dipercaya dapat melengkapi informasi dari *key informant*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa di masa lampau sebagai pelengkap hasil observasi dan wawancara (Wekke, 2019). Dokumentasi dapat berupa gambar, foto, film, serta objek lainnya. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tambahan mengenai kekalahan PDI-Perjuangan pada pemilu 2019 di Kabupaten Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Metode ini digunakan selama proses pengumpulan data secara interaktif dan terus menerus hingga selesai dan data menjadi jenuh (Sugiyono, 2013). Analisis data terdiri dari tiga langkah, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah pengumpulan, pemilihan dan klasifikasi data sesuai kebutuhan. Hasil dari reduksi data akan memudahkan peneliti untuk memahami data yang akan disajikan.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya dari reduksi data adalah menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan sejenisnya. Hal ini bertujuan agar data lebih terorganisir sehingga mudah dipahami untuk merancang pekerjaan selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah menyajikan data, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti dapat menerima hasil yang diperoleh pada langkah ini karena telah menemukan bukti yang dihasilkan dari data lapangan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan memberikan gambaran menyeluruh secara garis besar dari isi skripsi ini. Skripsi ini dibagi menjadi enam bab, adapun sistematika pembahasannya dibagi sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

PARTAI POLITIK DAN PELEMBAGAAN PARTAI

Pada bab ini memuat kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu definisi konseptual partai politik menurut Miriam Budiardjo dan pelebagaan partai politik menurut Randall dan Svasand

BAB II

PARTAI POLITIK DAN PELEMBAGAAN PARTAI

Dalam penelitian ini menggunakan satu konseptual dan satu kerangka teori yang dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, yaitu; konsep partai politik dan teori pelebagaan partai politik.

A. Partai Politik

a) Konsep Partai Politik

Secara konseptual, Miriam Budiardjo menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Ilmu Politik” bahwa partai politik merupakan:

“suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki pandangan, nilai dan cita-cita yang sama. Ia juga menjelaskan bahwa ambisi kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut posisi politik — (biasanya) melalui sarana konstitusional — untuk mencapai tujuannya (Budiardjo, 2008)”.

Pendapat di atas didukung oleh Carl J. Friedrich yang mengatakan bahwa partai politik adalah:

“sekumpulan orang yang terorganisir secara stabil dengan ambisi merebut atau mempertahankan kekuasaan bagi pimpinan partainya sehingga dapat memberikan kemanfaatan kepada anggota partainya baik bersifat idiil serta materiil (Budiardjo, 2008)”.

Sigmund Neumann berpendapat partai politik ialah:

“organisasi dari aktifis politik dan berupaya untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan merebut dukungan rakyat dengan cara berkompetisi dengan suatu kelompok atau kelompok lain yang berbeda pandangan (Budiardjo, 2008)”.

Sartori dalam Budiarto (2008:404) mendefinisikan partai politik adalah:

Kelompok politik yang mengikuti pemilihan partai politik adalah kelompok politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan melalui proses tersebut, mereka dapat menempatkan kandidat-kandidatnya dalam jabatan-jabatan publik (*A party is defined as a political group that actively participates in elections and has the ability to field candidates for public office*).

Menurut beberapa pendapat para ahli diatas, dapat diartikan partai politik yaitu sekumpulan orang yang mempunyai tujuan dan aspirasi yang sama, kemudian membentuk wadah atau organisasi untuk mencapai kekuasaan. Partai politik sebagai sebuah organisasi, secara ideal ditujukan untuk mengaktifkan dan mobilisasi rakyat, menawarkan kompromi dalam perbedaan pendapat, mewakili kepentingan tertentu dan menyediakan cara yang sah untuk mewarisi kepemimpinan politik.

b) Fungsi-Fungsi Partai Politik

Menurut Surbakti (2013), partai politik memiliki peran utama dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan tujuan untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan berdasarkan ideologi partai. Ketika partai politik beroperasi dalam sistem demokrasi, mereka melibatkan diri dalam tiga kegiatan utama untuk memperoleh otoritas pemerintahan, yaitu seleksi calon, kampanye, serta menjalankan fungsi legislatif dan eksekutif. Setelah berhasil mencapai kekuasaan pemerintahan, partai politik memegang peran dalam pengambilan keputusan politik. Selain fungsi-fungsi tersebut, terdapat juga fungsi lain dari partai politik, antara lain:

a) Sosialisasi Politik

Proses pembentukan sikap dan keyakinan politik anggota masyarakat merupakan hal penting yang diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan berpolitik.

b) Rekrutmen Politik

Proses seleksi dan penunjukan sekelompok atau individu dalam suatu partai adalah langkah penting yang berperan dalam menjalankan berbagai peran dalam sistem politik secara umum, dan pemerintahan secara khusus.

c) Partisipasi Politik

Fungsi ini lebih umum diterapkan dalam sistem politik demokrasi, di mana masyarakat diberikan kesempatan dan ajakan untuk menggunakan partai politik sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam proses politik. Anggota masyarakat atau warga negara biasa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum, serta memiliki peran dalam menentukan pemimpin pemerintahan. Fungsi ini dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti saat masyarakat memberikan suara mereka dalam pemilihan umum.

d) Pemadu Kepentingan

Ketika terdapat berbagai kepentingan yang beragam dan saling bertentangan di masyarakat, tujuan partai politik adalah untuk mempertimbangkan, menganalisis, dan menggabungkan berbagai kepentingan tersebut menjadi alternatif kebijakan umum yang akan diperjuangkan dalam proses perencanaan dan diimplementasikan sebagai keputusan politik.

e) Komunikasi Politik

Proses ini melibatkan interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana partai politik berperan sebagai saluran untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat serta sebagai wadah untuk menerima keluhan dan aspirasi masyarakat yang akan disampaikan kepada pemerintah.

f) Pengendalian Konflik

Ketika masyarakat memiliki kebebasan berpendapat yang berbeda dalam mengadvokasi kepentingan mereka, tidak jarang konflik dapat timbul di antara mereka. Oleh karena itu, partai politik dapat berperan sebagai

perantara untuk mengelola konflik melalui diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat, yang pada akhirnya akan menghasilkan keputusan politik sebagai upaya penyelesaian dari konflik tersebut.

g) Kontrol Politik

Kegiatan ini bertujuan untuk mengawasi kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, dengan tujuan mendeteksi adanya kesalahan atau penyimpangan. Kontrol politik diharapkan menjadi parameter bagi sebuah partai politik untuk melakukan perbaikan dan peremajaan secara berkelanjutan.

B. Pelembagaan Partai Politik

Banyak ahli telah mengemukakan gagasan pelembagaan partai. Salah satunya adalah konsep Huntington tentang pelembagaan partai. Menurut Huntington (2003), pelembagaan partai adalah proses dimana organisasi menjalankan prosedur untuk memperoleh nilai baku dan stabil. Huntington juga menegaskan bahwa yang terpenting bagi pembangunan politik bukanlah jumlah partai yang ada, melainkan daya tahan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang dijalankan. Pelembagaan partai memungkinkan partai bertindak dalam mandat mereka sendiri, sekaligus meminimalisir perubahan yang tidak perlu dalam partisipasi politik.

Pendapat tersebut dilengkapi oleh pemikiran Vicky Randall dan Lars Svasand dalam buku Katz dan Crotty yang berjudul “Handbook Partai Politik”. Dikatakannya, proses pelembagaan melibatkan dua aspek, yakni aspek internal-eksternal, dan aspek struktural-kultural. Jika kedua dimensi ini disilangkan, larik empat sel akan muncul, yaitu (1) derajat kesisteman (*systemness*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan struktural, (2) derajat identitas nilai (*value infusion*) suatu partai sebagai hasil persilangan aspek internal dengan kultural, (3) derajat otonomi suatu partai dalam pembuatan keputusan (*decisional autonomy*) sebagai hasil persilangan aspek eksternal dengan struktural, dan (4) derajat pengetahuan atau citra publik

(*reification*) terhadap suatu partai politik sebagai persilangan aspek eksternal dengan kultural.

Tabel 2. 1 Dimensi Pelembagaan Partai Randall dan Svasand

Dimensi Pelembagaan	Internal	Eksternal
Struktural (<i>Structural</i>)	Kesisteman (<i>Systemness</i>)	Otonomi Keputusan (<i>Decisional Autonomy</i>)
Kultural (<i>Attitudinal</i>)	Identitas Nilai (<i>Value Infusion</i>)	Citra Publik (<i>Reification</i>)

Randall dan Svasand merumuskan empat dimensi yang dapat digunakan untuk menganalisis derajat pelembagaan partai politik. *Pertama*, dimensi kesisteman (*systemness*), yaitu dimensi ini menjelaskan fungsi partai politik (sosialisasi politik, partisipasi politik, rekrutmen politik, pemadu kepentingan, kontrol politik, manajemen konflik dan komunikasi politik). *Kedua*, dimensi identitas nilai (*value infusion*), yakni dimensi ini terkait dengan identitas ideologi partai politik. Indikator dimensi ini terlihat dari hubungan antara partai politik dengan kelompok tertentu, dalam hal ini dependensi partai politik pada kelompok sosial tertentu. *Ketiga*, dimensi otonomi (*decisional autonomy*), yaitu dimensi suatu partai dalam pengambilan keputusan. Indikator munculnya dimensi otonomi adalah pengambilan keputusan oleh partai politik dalam hubungannya dengan relasi partai (pengusaha, organisasi masyarakat, pemerintah dan sebagainya). Hubungan partai dengan relasi partai bersifat saling ketergantungan atau didominasi oleh satu pihak. *Keempat*, dimensi citra publik (*reification*), yaitu dimensi citra publik terhadap suatu partai politik. Ukuran dari dimensi citra publik tentang partai politik adalah sejauh mana keberadaan partai politik dalam masyarakat sudah diketahui atau apakah partai-partai tersebut tidak dikenal publik.

a) Dimensi kesisteman (*systemness*)

Randall dan Svasand (2002) melakukan penelitian tentang bagaimana pihak internal mengelola struktur kekuasaan mereka. Dimensi kesisteman adalah

proses pelaksanaan tugas partai politik sesuai dengan aturan, kondisi, proses, dan mekanisme yang disepakati dalam AD-ART, yang dirumuskan secara komprehensif dan rinci sebagai pedoman untuk mengarahkan perilaku dalam pelaksanaan semua tugas partai politik. Dalam dimensi ini, beberapa faktor memiliki pengaruh yang signifikan, termasuk (1) bagaimana partai terbentuk dan berkembang, (2) regulasi akses terhadap sumber daya keuangan, (3) hubungan partai dengan pemimpinnya, (4) hubungan antara kepemimpinan nasional dan lokal, dan (5) implikasi dari klientelisme. Dari perspektif kesisteman, sebuah partai dianggap telah melembagakan dirinya ketika memenuhi tugas-tugas yang diuraikan dalam AD-ART yang sudah ditetapkan dan disepakati. Dimensi Identitas nilai (*values infusion*)

Berdasarkan ideologi partai, partai dilihat dalam konteks politik dan aktivitas partai. Berdasarkan ideologi itu kemudian tercipta basis sosial pendukung partai yang mendukung mereka karena merasa sejalan dengan pola dan arah yang diusung partai. Oleh karena itu, identitas nilai partai selalu terkait dengan kelas sosial atau masyarakat yang mendukung partai tersebut (Randall dan Svasand, 2002). Melihat kelembagan partai dalam dimensi ini pertama-tama apakah partai tersebut memiliki keterkaitan dengan suatu gerakan sosial atau kelompok etnik tertentu (yayasan kerakyatan), seperti komunitas agama dan komunitas etnik. Apakah pengaruh klientelisme kemudian di dalam partai, antara anggota dan partainya, apakah lebih instrumental, dengan anggota selalu menunggu sumber daya yang nyata (imbalan dari partai) atau lebih bersifat ideologis, dimana ada keharmonisan di dalam partai yang mengharapkan keselarasan antara ideologi dan kepemimpinan partai. Sebuah partai dianggap terlembagakan dalam hal identitas nilai ketika sudah memiliki kelompok masyarakat yang menjadi pengikut setia (basis sosial) karena model dan

arah politik partai dan pengaruh politik sehingga kecenderungan pengikut sesuai dengan ideologi partai (Lutfi, 2012).

b) Dimensi otonomi

Dimensi otonomi yang dimaksud adalah otonomi dalam pembuatan keputusan (*desicional autonomy*). Derajat otonomi menentukan apakah pengambilan keputusan suatu partai dipengaruhi oleh aktor di luar partai, termasuk mereka yang memiliki sumber kekuasaan tertentu seperti penguasa atau pemerintah atau sumber pendanaan seperti pengusaha, pihak ketiga, atau sumber dukungan yang luas. Ketika sebuah partai bergantung pada satu pihak dalam keputusannya, partai tersebut melemah karena tingkat loyalitas pendukungnya hanya bergantung pada pihak tersebut. Kemudian dari perpektif tersebut, partai dianggap melembaga dari segi ini ketika semua keputusan yang diambil adalah keputusan anggota partai itu sendiri dan tidak ada campur tangan dari pihak eksternal partai (Randall dan Svasand, 2002).

c) Dimensi Citra Publik (*reification*)

Citra publik atau reifikasi ini adalah mengenai sejauh mana keberadaan suatu partai dalam imajinasi pada masyarakat. Jika suatu partai sudah melekat pada pengetahuan masyarakat, maka masyarakat mengarahkan keinginan dan harapannya kepada pihak yang terpilih.. Yang terpenting pada reifikasi suatu partai adalah umur panjang, yaitu kemampuan partai untuk bertahan dalam jangka waktu yang lama (Randall dan Svasand, 2002). Dari perspektif citra publik tersebut, sebuah partai sudah melembaga ketika masyarakat dapat mengenal sosok dan kiprah partai politik berdasarkan identitas nilai-nilai partai, sehingga publik memahami tindakan yang akan diambil oleh partai tersebut.

Dimensi pelembagaan partai yang dirumuskan oleh Randall dan Svasand inilah yang penulis jadikan sebagai kerangka teoritis penelitian ini. Pasalnya, konsep

pelebagaan Randall dan Svasand merupakan hasil perumusan konsep pelembagaan partai dari banyak ahli. Apalagi, konsep ini sudah meliputi pelembagaan internal dan eksternal partai politik. Konsep pelembagaan partai ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Surbakti (2003).

a) Dimensi Kesisteman (*Systemness*)

Menurut Surbakti (2003), derajat dimensi kesisteman adalah proses dimana pelaksanaan fungsi-fungsi partai politik dilakukan sesuai dengan aturan, persyaratan, mekanisme serta prosedur yang disepakati dalam AD/ART sehingga dapat menjadi aturan dan pedoman dalam menjalankan semua fungsi partai politik. Sebuah partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bilamana partai politik menjalankan fungsinya sesuai dengan AD/ART yang telah dirumuskan secara komprehensif dan rinci.

b) Dimensi Identitas Nilai (*Value Infusion*)

Selanjutnya, identitas nilai didefinisikan oleh Surbakti (2003) sebagai orientasi dan aktifitas politik partai politik yang didasarkan pada platform ideologi partai, yaitu model dan arah politik partai yang diperjuangkan basis sosial pendukungnya. Menurutnya, gerakan sosial atau kelompok masyarakat mendukung suatu partai karena mereka mengidentifikasi kecenderungan politiknya dengan platform atau ideologi partai tersebut (basis sosial/pendukung loyal). Jika suatu partai politik telah memiliki pendukung loyal untuk corak dan orientasi politiknya, maka partai tersebut dapat dikatakan telah melembaga dari segi identitas nilai. Dukungan tersebut diberikan kepada partai bukan karena penerimaan materi tertentu, melainkan karena ideologi atau platform partai tersebut. Partai politik dengan basis dukungan sosial yang spesifik niscaya akan memiliki identitas nilai yang jelas. Tetapi, karena ideologi partai selama ini belum ditransformasikan menjadi model dan arah kebijakan publik yang diperjuangkan, perbedaan

antara partai politik hanya bersifat simbolis. Oleh sebab itu, masih sulit mengklasifikasikan basis sosial pendukung masing-masing partai politik di Indonesia.

c) Derajat Otonomi (*Decisional Autonomy*)

Surbakti (2003) berpendapat bahwa derajat otonomi dalam pengambilan keputusan partai politik dipengaruhi oleh hubungan antara partai dan aktor di luar partai, baik dengan sumber kekuasaan tertentu (pemimpin, pemerintah) maupun sumber sumber daya (pengusaha, pemimpin), lembaga negara atau eksternal) dan sumber dukungan massa (organisasi publik). Pendapat ini sejalan dengan pandangan Huntington bahwa otonomi partai merupakan salah satu kriteria pelembagaan. Partai akan memiliki otonomi pengambilan keputusan ketika pendanaan untuk kegiatan partai diperoleh dari iuran keanggotaan, iuran administrasi dan iuran aktivis.

d) Derajat Pengetahuan Publik (*Reification*)

Derajat pengetahuan atau citra publik terhadap partai politik mengacu pada tertanam atau tidaknya ideologi partai politik dalam kesadaran masyarakat. Sebuah partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik manakala masyarakat mendefinisikan karakter dan aktifitas partai politik itu sesuai identitas nilai (*platform*) yang diusung oleh partai tersebut sehingga publik mengerti – meskipun belum tentu setuju – mengapa suatu partai politik melakukan jenis tindakan tertentu dan tidak melakukan jenis tindakan lain.

BAB III
LANDSCAPE KABUPATEN CIREBON DAN PROFIL PDI-PERJUANGAN
DI KABUPATEN CIREBON

A. Kondisi Geografis Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Barat dan berfungsi sebagai batas serta pintu gerbang ke Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kabupaten ini membentang dari Barat Laut hingga Tenggara. Dari segi topografi, wilayahnya dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, terdapat daerah dataran rendah yang umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, mencakup Kecamatan Gegecik, Kaliwedi, Kapetakan, Arjawinangun, Panguragan, Klangeran, Cirebon Utara, Cirebon Barat, Weru, Astanajapura, Pangenan, Karangsembung, Waled, Ciledug, Losari, Babakan, Gebang, Palimanan, Plumbon, Depok, dan Kecamatan Pabedilan. Sedangkan bagian lainnya termasuk dalam daerah dataran tinggi.

Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Cirebon berada pada posisi 108°40' - 108°48' Bujur Timur dan 6°30' - 7°00' Lintang Selatan, yang dibatasi oleh:

- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kabupaten Indramayu
- Sebelah barat Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan
- Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kotamadya Cirebon dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah)

Kabupaten Cirebon memiliki karakteristik topografi yang beragam. Wilayah kecamatan yang terletak di sepanjang jalur pantai utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 meter di atas permukaan air laut. Sementara itu, wilayah kecamatan yang terletak di bagian selatan memiliki ketinggian antara 11 - 130

meter di atas permukaan laut. Kabupaten Cirebon dilalui oleh 18 sungai yang berhulu di bagian selatan. Beberapa sungai besar di Kabupaten Cirebon antara lain Cisanggarung, Ciwaringin, Cimanis, Cipager, Pekik, dan Kalijaga. Sungai-sungai besar tersebut umumnya digunakan untuk irigasi sawah selain juga digunakan untuk mandi, mencuci, dan sebagai tempat pembuangan umum.

Gambar 3. 1

Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Cirebon.



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2023

B. Penduduk Kabupaten Cirebon

a. Kondisi penduduk menurut jenis kelamin

Kabupaten Cirebon adalah salah satu kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Barat. Meskipun penduduk Kabupaten Cirebon

terus bertambah, namun laju pertumbuhan penduduknya dari sensus ke sensus cenderung melambat. Pada tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Cirebon mencapai 2.189.785 jiwa, terdiri dari 1.108.513 jiwa penduduk laki-laki dan 1.081.272 jiwa penduduk perempuan.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Waled	27.544	26.863	54.407
Pasaleman	13.414	13.472	26.886
Ciledug	22.466	22.035	44.501
Pabuaran	17.967	17.591	35.558
Losari	30.396	29.764	60.160
Pabedilan	28.308	28.089	56.397
Babakan	34.778	34.858	69.636
Gebang	32.819	32.414	65.233
Karangsembung	18.461	18.164	36.625
Karangwareng	14.256	13.895	28.151
Lemahabang	27.437	26.679	54.116
Susukan Lebak	20.539	19.820	40.359
Sedong	20.742	20.082	40.824

Astanajapura	38.293	36.492	74.785
Pangenan	22.627	21.832	44.459
Mundu	36.554	35.207	71.761
Beber	21.304	19.975	41.279
Greged	27.716	26.259	53.975
Talun	33.504	32.350	65.854
Sumber	46.138	44.753	90.891
Dikupuntang	31.754	31.197	62.951
Palimanan	30.929	30.671	61.600
Plumbon	40.897	39.165	80.062
Depok	32.197	31.277	63.474
Weru	35.345	33.201	68.546
Plered	27.081	26.095	53.176
Tengahatani	21.658	20.932	42.590
Kedawung	29.566	29.121	58.687
Gunungjati	39.786	39.521	79.307
Kapetakan	29.247	28.327	57.574
Suranenggala	22.380	22.227	44.607
Klangenan	26.477	26.199	52.676
Jamblang	19.465	19.178	38.643

Arjawinangun	34.943	33.948	68.891
Panguragan	21.407	21.219	42.626
Ciwaringin	18.705	18.623	37.328
Gempol	23.358	22.399	45.757
Susukan	32.890	32.792	65.682
Gegesik	34.833	34.427	69.260
Kaliwedi	20.332	20.159	40.491
Jumlah	1.108.513	1.081.272	2.189.785

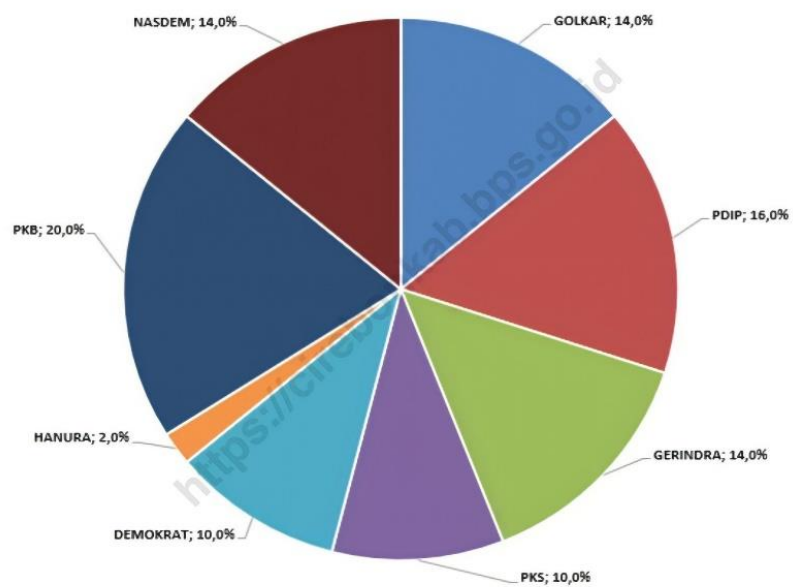
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon

C. Pemerintahan Kabupaten Cirebon

Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan yang terdiri dari 412 Desa dan 12 Kelurahan. Jumlah RW dan RT di Kabupaten Cirebon adalah 2.955 dan 9.431, secara berturut-turut. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 terbagi berdasarkan Partai Politik. Terdapat 36 anggota laki-laki dan 14 anggota perempuan. Tiga fraksi terbesar adalah Partai Kebangkitan Bangsa dengan 10 anggota, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan 8 anggota, serta Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Nasional Demokratis masing-masing dengan 7 anggota.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 adalah 10.440 orang. PNS ini terbagi ke dalam empat golongan, yaitu Golongan I dengan 37 orang, Golongan II dengan 1.040 orang, Golongan III dengan 5.153 orang, dan Golongan IV dengan 4.210 orang.

Gambar 3. 2 Persentasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2023

Tabel 3. 2 Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2021 dan 2022

Partai Politik <i>Political Parties</i>	2021		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
Partai Golongan Karya (GOLKAR)	5	2	7
Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	0	0	0
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	6	2	8
Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	4	3	7
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	1	5
Partai Demokrat	4	1	5
Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	0	1
Partai Kebangkitan Bangsa	8	2	10
Partai Nasional Demokratis (NASDEM)	4	3	7
Partai Bulan Bintang	0	0	0
Jumlah/Total	36	14	50

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon, 2023

Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Cirebon, 2021 dan 2022

Jabatan Occupation	2021		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives	–	–	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives	–	–	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	31	2	33
Administrator/Administrator	179	42	221
Pengawas/Supervisor	493	243	736
Eselon V/5 th Echelon	–	–	0
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	–	–	0
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	2 386	3 546	5 932
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	460	1 338	1 798
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	270	130	400
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position	1 415	779	2 194
Jumlah/Total	5 234	6 080	11 314

Jabatan Occupation	2022		Jumlah Total
	Laki-laki Male	Perempuan Female	
(1)	(5)	(6)	(7)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives	–	–	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives	–	–	0
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	30	3	33
Administrator/Administrator	158	42	200
Pengawas/Supervisor	443	220	663
Eselon VI/5 th Echelon	–	–	0
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	–	–	0
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	2 123	3 208	5 331
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	464	1 355	1 819
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	294	148	442
Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana General Functional Position	1 253	699	1 952
Jumlah/Total	4 765	5 675	10 440

D. Sejarah Lahirnya PDI-Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia didirikan pada tanggal 10 Januari 1973. Pendahulu PDI merupakan hasil penggabungan lima partai dengan ideologi nasionalisme, sosialisme, Marhaenisme, Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Lima partai yang bergabung adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Tembok, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katolik. Sejak PDI berdiri, konflik internal di dalam partai berulang kali terjadi. Apalagi dalam peristiwa-peristiwa yang menimbulkan konflik antar elit pimpinan partai, yang muncul dari unsur-unsur PNI. Alhasil, perolehan suara PDI di beberapa pemilu semasa Orde Baru tidak pernah lebih baik.

Sejarah panjang PDI-Perjuangan yang berhadapan langsung dengan rezim Orde Baru yang otoriter membedakan partai politik ini dengan partai lain. PDI-Perjuangan terbukti menjadi pionir dalam mendemokratisasi sistem politik dengan menggantikan pemerintahan Orde Baru yang otoriter. Sejak tahun 1927, setelah menyelesaikan pendidikannya, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di kalangan pemuda masa sebagai wadah kelompok-kelompok nasionalis Indonesia. Partai terus berkembang dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk mendukung Soekarno menjadi Proklamator Republik Indonesia dan Presiden pertamanya. Dalam pemilu 1955, PNI mencalonkan diri dan menang, tetapi harus digabung dengan PDI di bawah kebijakan Orde Baru 1971 Suharto. Sejak awal 1990-an, Megawati Soekarno Putri muncul sebagai pemimpin partai alternatif yang menyebabkan disintegrasi partai. Namun, Megawati dengan cepat menyatukan mereka di bawah bendera PDI-Perjuangan.

Pada awal reformasi, yang dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, PDI-Perjuangan memainkan peran yang signifikan dalam perubahan politik yang terjadi di Indonesia. PDI-Perjuangan

adalah salah satu partai politik utama yang mengusung semangat reformasi, demokrasi, dan pemberdayaan rakyat.

Pada tahun 1999, PDI-Perjuangan mengikuti pemilihan umum yang bebas dan adil yang pertama di Indonesia setelah Orde Baru. Partai ini memenangkan suara terbanyak kedua dan mendapatkan 153 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menjadikannya partai politik terbesar kedua di parlemen. Selain itu, pada tahun yang sama, PDI-Perjuangan juga berhasil mengusung Megawati Sukarnoputri, putri pendiri Indonesia Soekarno, sebagai calon presiden. Megawati kemudian menjadi Presiden Indonesia yang kelima dan merupakan presiden perempuan pertama di negara ini.

Pada masa reformasi, PDI-Perjuangan secara aktif terlibat dalam pembentukan dan perumusan kebijakan nasional. Mereka memainkan peran penting dalam penyusunan UUD 1945 yang direvisi, yang menandai perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia. PDI-Perjuangan juga terlibat dalam upaya melawan korupsi, memperjuangkan hak-hak perempuan, memperkuat otonomi daerah, dan mendorong reformasi agraria. Selama masa reformasi, PDI-Perjuangan mengalami perubahan dan tantangan internal. Terdapat perpecahan dan perubahan kepengurusan dalam partai, namun PDI-Perjuangan berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu kekuatan politik yang signifikan di Indonesia. Partai ini tetap memiliki dukungan yang kuat dari sebagian besar rakyat Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan.

Sejak reformasi, PDI-Perjuangan telah berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum di Indonesia dan memainkan peran yang signifikan dalam politik nasional. Mereka telah memenangkan pemilihan umum pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta menjadi partai politik dengan jumlah kursi terbanyak di DPR pada beberapa periode. Pada kesimpulannya, PDI-Perjuangan memiliki sejarah yang panjang dan penting selama periode reformasi di Indonesia. Partai ini telah memainkan peran yang signifikan dalam memperjuangkan demokrasi, reformasi politik, dan

pemberdayaan rakyat. Meskipun mengalami tantangan internal, PDI-Perjuangan tetap menjadi kekuatan politik yang relevan di Indonesia hingga saat ini.

E. Ideologi PDI-Perjuangan

Ideologi yang dianut oleh PDI Perjuangan adalah Ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Ideologi ini telah diterapkan sejak pendirian awal partai dan secara resmi diakui pada Kongres II PDI-P tahun 2005 serta dicantumkan dalam AD/ART PDI-Perjuangan hingga saat ini. Identitas partai mencakup kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. PDI Perjuangan juga dikenal sebagai partai yang menganut prinsip gotong royong, demokratis, kemandirian, keuletan, dan revolusioner yang progresif. Lebih lanjut, Menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang terakhir direvisi pada Mukhtamar XIII PDIP pada tahun 2015, ideologi PDIP dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 4 AD/ART PDI-Perjuangan menyebutkan bahwa ideologi PDIP adalah Pancasila, sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme yang berdasarkan pada persatuan Indonesia. Ini menggambarkan komitmen PDI-Perjuangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan penekanan pada nilai-nilai sosialisme yang moderat, demokrasi, dan nasionalisme. Sosialisme dalam konteks PDI-Perjuangan tidak bermakna penghapusan kepemilikan pribadi atau penerapan sosialisme secara ekstrem, tetapi mengacu pada prinsip keadilan sosial, distribusi yang lebih merata, dan perlindungan terhadap kepentingan rakyat.

Selain itu, AD/ART PDI-Perjuangan juga menekankan pentingnya demokrasi sebagai prinsip politik yang fundamental. PDI-Perjuangan mengupayakan partisipasi politik yang luas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Nasionalisme juga menjadi bagian dari ideologi PDI-Perjuangan, dengan penekanan pada persatuan Indonesia dan keutuhan wilayah negara. PDI-Perjuangan mengadvokasi pemajuan kepentingan nasional, perlindungan kedaulatan negara, serta pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Ideologi PDI-Perjuangan yang tercantum dalam AD/ART tersebut menjadi pedoman dalam penyelenggaraan partai, pembentukan kebijakan, serta tindakan dan sikap politik yang diambil oleh PDI-Perjuangan.

F. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon

Masing-masing partai memiliki beberapa kepengurusan dan cabangnya untuk menjalankan tugas dan tujuan partai sampai ke tingkat yang terkecil. Tak terkecuali Partai PDI Perjuangan karena kekuatannya saat ini merupakan partai dengan dukungan terbesar di Indonesia. Tentu PDI-Perjuangan juga punya pimpinan daerah. Salah satunya Dewan Perwakilan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon. DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon sendiri merupakan organisasi di bawah naungan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-Perjuangan yang memiliki kekuasaan kepemimpinan di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Cirebon. Tujuan dibentuknya DPC adalah untuk mengatur kegiatan partai dan mencapai tujuan partai yang tertuang dalam AD-ART Partai PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon membawahi 40 PAC (Pengurus Anak Cabang) dari wilayah Kabupaten Cirebon yang memiliki 40 kecamatan dan 424 desa.

**Tabel 3. 4 Penjelasan Struktur Partai Demokrasi di Indonesia Perjuangan
Di Tingkat Kabupaten**

Dewan Pimpinan Cabang (DPC)	Melaksanakan tugas dan fungsi DPP di tingkat Kabupaten/Kota
Pengurus Anak Cabang (PAC)	Melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya
Pengurus Ranting	Melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya

Pengurus Anak Ranting	Melaksanakan kebijakan dan program Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/RW atau sebutan lainnya
-----------------------	---

Sumber: diolah oleh penulis

**Tabel 3. 5 Struktur, Komposisi & Personalia
DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon
Masa Bakti 2015-2020**

No	Nama	Jabatan
1	H. Mustofa, S.H	Ketua
2	Tjasila	Wakil Ketua Bid. Kehormatan Partai
3	Asep Saefullah, S.Pd.I	Wakil Ketua Bid. Kaderisasi & Ideologi
4	Aan Setyawan, S.Si	Wakil Ketua Bid. Organisasi
5	Sunjaya Purwadisastra, M.M., M.Si	Wakil Ketua Bid. Pemenangan Pemilu
6	H. Suminta	Wakil Ketua Bid. Komunikasi Politik
7	Rita Komala, S.H	Wakil Ketua Bid. Polhukam
8	Sawita	Wakil Ketua Bid. Maritim
9	Nina Kerisnawati	Wakil Ketua Bid. PMK
10	Hj. Amenah, S.E	Wakil Ketua Bid. Ekonomi
11	Bejo Kasiyono	Wakil Ketua Bid. Buruh, Tani & Nelayan
12	Roningsih	Wakil Ketua Bid. Perempuan & Anak
13	Moh. Saeful Adji, S.E	Wakil Ketua Bid. POKSB
14	Yayat Hidayat	Wakil Ketua Bid. Pariwisata & Ekraf

15	Edi Mustofa	Sekretaris
16	Rini Novianti Agustin	Wakil Sekretaris Internal
17	Debby Yulita	Wakil Sekretaris Eksternal
18	Jahari	Bendahara
19	Suherman	Wakil Bendahara

Sumber: SK DPP PDI-Perjuangan No : 26.06-C/KPTS-DPC/DPP/VII/2017

Dalam menunjang sebuah kepentingan partai, semua partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas guna memiliki peluang yang lebih besar melalui pengembangan diri demi kebaikan partai. Partai politik juga tertarik untuk memperluas jaringan perekrutan kader melalui berbagai lini disamping proses kaderisasi pada struktural partai. Dengan membentuk dan memperkuat organisasi-organisasi (seperti *Underbouw*), yang melibatkan kelompok buruh, petani, nelayan, pemuda, pelajar dan perempuan, dapat meningkatkan peluang partisipasi (Budiardjo, 2008).

Pada perjalanannya, PDI-Perjuangan juga memiliki infrastruktur politik seperti organisasi sayap partai yang dibentuk mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Organisasi sayap ini berperan penting dalam mendukung operasional Partai PDI-Perjuangan, dengan mengadakan kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan fungsi partai. Beberapa organisasi yang berafiliasi dengan PDI Perjuangan dan menjadi organisasi sayapnya adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. 6 Daftar Organisasi Sayap
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	a. Banteng Muda Indonesia (BMI)
	b. Taruna Merah Putih (TMP)

	c. Gerakan Nelayan dan Tani (GANTI)
	d. Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi)
	e. Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem)

Sumber: diolah oleh penulis

Selain organisasi sayap, terdapat badan-badan partai yang sering berkepentingan untuk PDI-Perjuangan antara lain:

**Tabel 3. 7 Daftar Organisasi Badan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-Perjuangan)	a. BSPN (Badan Saksi Pemilu Nasional)
	b. Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu)
	c. Baleglit (Badan Legislasi dan Penelitian)
	d. Badiklat (Badan Pendidikan dan Pelatihan)
	e. BBHAR (Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat)
	f. Baguna (Badan Penanggulangan Bencana)

	g. BKN (Badan Kebudayaan Nasional)
	h. BPEK (Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan)
	i. Komunitas Juang Partai
	j. Satgas Partai (Satuan Tugas Partai)

Sumber: diolah oleh penulis

G. Dinamika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon

Hadirnya PDIP di Kabupaten Cirebon lahir dari faktor historis yang Panjang dimana pada era demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, Cirebon merupakan wilayah yang didominasi oleh simpatisan dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI), yang menjadi cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Perjalanan awal partai ini di Kabupaten Cirebon sudah mendapat basis dukungan yang kuat sehingga ketika era reformasi pemilu langsung diadakan, partai ini selalu mendapat jumlah suara yang signifikan. PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon mendapat kepercayaan banyak dari masyarakat Cirebon terutama dari kaum wong cilik itu sendiri.

Kemenangan demi kemenangan diraih baik pemilihan kepala daerah yang selalu berhasil mendudukkan kadernya di posisi Bupati atau Wakil Bupati. Pemilihan legislatif yang selalu berhasil meraih kursi terbanyak, hingga pemilihan gubernur dan presiden yang menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai kantong suara terbanyak pasangan yang diusung oleh PDI-Perjuangan. Akan tetapi, status quo tersebut mulai goyang ketika dalam kurun waktu 2014-2019 banyak kader penting yang juga menduduki jabatan strategis di Kabupaten Cirebon terkena kasus hukum. Pergantian

Bupati atau Wakil Bupati, pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD, pergantian struktural DPC juga membuat internal sedikit bergolak.

Puncaknya adalah ketika PDI-Perjuangan untuk pertama kalinya menduduki posisi kedua dalam pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Cirebon. Hal ini menjadi bukti nyata bagaimana segala dinamika yang terjadi dalam tubuh PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon memiliki dampak pada perolehan elektoral partai. Selain peristiwa kasus hukum tersebut, program-program pemerintahan juga kurang dirasakan oleh banyak masyarakat sehingga citra PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon kurang mendapat nilai yang positif di masyarakat. Oleh karena itu, analisis dan dinamika yang terjadi di tubuh PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon akan dibahas pada bab selanjutnya melalui pendekatan pelebagaan partai.

BAB IV
ANALISIS DIMENSI KESISTEMAN DAN IDENTITAS NILAI
PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-PERJUANGAN
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan hasil analisis data lapangan yang membahas pelebagaan PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon pada periode 2014-2019. Analisis ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dan dikumpulkan melalui wawancara serta studi literatur dengan menggunakan berbagai dokumen pendukung. Pada bab ini, akan dilakukan analisis mendalam yang berfokus pada aspek internal teori pelebagaan partai menurut Randall dan Svasand, yakni pada dimensi kesisteman dan identitas nilai.

A. Dimensi Kesisteman

Menurut Surbakti (2003), sebuah partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi kesisteman bilamana partai politik menjalankan fungsinya sesuai dengan AD/ART yang telah dirumuskan secara komprehensif dan rinci. Oleh karena itu, tujuan dari bab ini adalah ingin menjelaskan tentang upaya PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan fungsi-fungsi partai dalam internal partai. Untuk mengukur pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, terdapat tiga indikator yang akan digunakan yaitu pengelolaan demokrasi internal partai, pola rekrutmen dan kaderisasi partai, serta kesolidan (keutuhan) partai (Lutfi, 2012).

1. Demokrasi Internal

PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon secara konsisten menerapkan prinsip pengelolaan demokrasi internal partai yang sesuai dengan AD/ART dan berbagai mekanisme serta prosedur yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada semua pengurus dan kader partai untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Partai ini tidak hanya menerapkan aturan internal, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses perumusan kebijakan partai. Oleh karena itu,

PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon memberikan prioritas pada proses musyawarah dalam pembuatan aturan dan perumusan kebijakan tertentu.. Seperti hasil wawancara dengan Wakil Ketua Bid. Organisasi DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020 Aan Setyawan dibawah ini.

“Sesuai dengan instruksi DPP bahwa partai khususnya di tingkat DPC melaksanakan rapat pleno internal setiap seminggu sekali. Terdapat 19 orang selaku fungsionaris DPC yang wajib melakukan rapat pleno yang hasilnya dilaporkan ke DPD maupun DPP. Pada rapat tersebut biasanya membahas perkembangan politik di Kabupaten Cirebon, perkembangan kegiatan pemerintahan (seperti dinamika di DPRD terkait rapat paripurna, pembentukan pansus dan lain sebagainya) serta aspirasi masyarakat di daerah terkait infrastruktur, program bantuan sosial dan lain sebagainya. Setelah rapat internal fungsionaris DPC yang diadakan setiap seminggu sekali, kita mengundang Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP Kabupaten Cirebon yang berjumlah 40 PAC untuk hadir pada rapat yang diadakan setiap sebulan sekali. Pembahasan pada rapat tersebut adalah menyampaikan hasil maupun keputusan rapat internal fungsionaris DPC kepada seluruh PAC untuk kemudian diteruskan kembali sampai pada tingkat bawah PDIP yaitu ranting dan kader di Kecamatan masing-masing” (Wawancara Aan Setyawan, Wakil Ketua Bid. Organisasi DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 8 Mei 2023).

Menurut narasumber diatas, bentuk permusyawaratan pada tingkat DPC adalah diadakan rapat pleno internal yang rutin diadakan setiap seminggu sekali yang dihadiri oleh 19 pengurus fungsionaris DPC PDIP Kab. Cirebon yang pembahasannya adalah terkait perkembangan politik, kegiatan pemerintahan dan aspirasi masyarakat di daerah. Pada level ini, setiap hasil rapat tersebut dilaporkan kepada DPD maupun DPP PDIP.

Lebih lanjut narasumber juga menyatakan, terdapat rapat internal yang diadakan sebulan sekali untuk menyampaikan hasil rapat internal fungsionaris DPC kepada seluruh PAC PDIP Kabupaten Cirebon yang kemudian diteruskan kepada tingkat bawah PDIP Kabupaten Cirebon baik di tingkat ranting maupun kader. Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa sistem demokrasi internal partai berjalan dengan baik dibuktikan oleh partisipasi aktif dari seluruh lapisan partai terhadap suatu kebijakan maupun keputusan partai.

Menurut Bagian Ketujuhbelas Pasal 68 Ayat 5 AD/ART PDI-Perjuangan, urutan dan jenjang rapat di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Konferensi Cabang;
- b. Rapat DPC Partai;
- c. Rapat Kerja Cabang;
- d. Rapat Koordinasi Cabang; dan
- e. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Cabang.

Adapun mekanisme pengambilan dan keputusan rapat pada tingkat DPC Partai terdiri dari:

- 1) Rapat DPC Partai terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno; dan
 - b. Rapat Bidang.
- 2) Rapat Pleno DPC Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (Satu) kali setiap bulan membahas hasil Rapat Pimpinan Bidang Internal Partai, Rapat Pimpinan Bidang Pemerintahan dan Rapat Pimpinan Bidang Kerakyatan.
- 3) Rapat Pleno DPC Partai dihadiri oleh Ketua DPC Partai, Wakil-Wakil Ketua Bidang Internal, Wakil-Wakil Ketua Bidang Program, Sekretaris, Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara.
- 4) Rapat Bidang Partai dihadiri oleh Wakil-Wakil Ketua Bidang, Wakil Sekretaris terkait dan Wakil Bendahara.

5) Rapat-Rapat Bidang Partai diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) minggu.

“Terkait rekrutmen pencalonan anggota legislatif maupun eksekutif, sifatnya terbuka untuk umum. Namun, ada beberapa mekanisme dan prosedur yang dilalui yaitu memenuhi persyaratan (mempunyai KTA, rekam jejak calon seperti Riwayat Pendidikan, riwayat kaderisasi), pembobotan, perangkan dan terakhir rapat pleno tingkat DPC yang kemudian diserahkan ke DPP untuk diputuskan. Pada pemilu 2019 kemarin, kelemahan kami ialah kurang maksimalnya rekrutmen caleg baik dari segi finansial dan kompetensi SDM sehingga menggaet calon dari eksternal yang ternyata kurang mampu turun kebawah sehingga berdampak pada perolehan suara PDIP di Kabupaten Cirebon” (Wawancara Bejo Kasiyono, Wakil Ketua Bid. Buruh Tani & Nelayan DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 8 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui proses rekrutmen kebijakan yang strategis seperti penentuan calon anggota legislatif maupun eksekutif (DPRD II dan Bupati/Wakil Bupati), juga melibatkan partisipasi pengurus DPC melalui mekanisme dan prosedur yang ada. Walaupun demikian, dalam kondisi tersebut DPC tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan karena keputusan berada di tangan Ketua Umum melalui DPP.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara diatas, maka dapat disimpulkan sistem pengelolaan demokrasi di internal partai berjalan dengan baik dimana setiap proses pengambilan keputusan atau kebijakan mengedepankan musyawarah mufakat. Bentuk permusyawaratan yang dilakukan berupa rapat mingguan dan bulanan dengan melibatkan pengurus mulai dari struktur tingkat DPC hingga Anak Ranting. Namun, dalam beberapa kebijakan yang sifatnya strategis dan urgen seperti rekrutmen calon anggota legislatif dan eksekutif, DPC tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan. Hal ini memang sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur

yang ada didalam partai dimana kebijakan strategis tertentu yang dihasilkan oleh tingkat DPC harus dilaporkan kepada level struktur diatasnya untuk mendapat persetujuan dan pengesahan. Dibawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, PDIP mengalami transformasi menjadi kekuatan politik yang signifikan. Pengaruh Megawati begitu besar hingga dia secara aklamasi terus dipilih sebagai Ketua Umum partai. Dalam posisi yang sangat strategis tersebut, dia memiliki kekuasaan yang besar, termasuk memiliki peran penting dalam menentukan kepala daerah dan calon legislatif (Prihatmoko, 2022).

Namun, hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan intervensi masih menjadi gejala dalam setiap keputusan tertentu. Sebagai contoh, karena DPC tidak memiliki kewenangan menetapkan dan mengesahkan daftar caleg sehingga berujung pada rekrutmen caleg yang kurang maksimal pada pemilu 2019 dan berdampak pada penurunan suara PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon.

Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi (2012) juga menunjukkan hasil yang sama dimana pada tingkat pelembagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai, pada dimensi demokrasi internal masih terdapat kecenderungan intervensi dari level DPD I dan DPP dalam setiap pengambilan kebijakan tertentu yang diputuskan oleh DPD II Partai Golkar Kabupaten Sinjai

2. Pola Rekrutmen dan Kaderisasi Partai

Kaderisasi adalah jantung dari partai politik. Proses kaderisasi tidak hanya terkait dengan kelangsungan partai politik sebagai sebuah entitas semata, tetapi di samping itu, kaderisasi juga terkait erat dengan perwujudan visi-misi atau gagasan besar yang sedang dijalankan oleh partai politik. Dimana, narasi besar itu akan menjadi sumber inspirasi yang mampu berperan sebagai kekuatan moral dan sumber ideologis dari setiap langkah dan gerak kader (Marsh, 2011).

PDI-Perjuangan merupakan partai yang menerapkan pola kaderisasi secara terstruktur dan sistematis dimana menurut pasal 84 AD/ART PDI-Perjuangan

tentang sistem kaderisasi partai, terdapat empat tingkatan kaderisasi yakni; Pratama, Madya, Utama dan Kader Pendidik. Seperti halnya yang disampaikan dalam wawancara dengan Asep Saefullah, Wakil Ketua Bid. Kaderisasi & Ideologi DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020 dibawah ini.

“Pola sistem kaderisasi di internal PDIP terdapat empat tingkatan yaitu Pratama, Madya, Utama dan Kader Pendidik atau Guru Kader. Untuk di tingkat DPC melaksanakan kaderisasi kader pada tingkat pratama yang diberikan kepada struktural dari tingkat anak ranting, ranting dan PAC. Tujuan dari pembinaan kaderisasi ini adalah untuk mendidik kader-kader partai dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi partai yang kemudian *outputnya* dilaporkan ke DPD Jawa Barat” (Wawancara Asep Saefullah, Wakil Ketua Bid. Kaderisasi & Ideologi DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 9 Mei 2023).

Berdasarkan pendapat narasumber diatas, sistem kaderisasi PDIP ialah berbasis kaderisasi berjenjang. Pendidikan kaderisasi pada tataran DPC dimulai dari tingkat Pratama yang diselenggarakan bagi pengurus struktur tingkat anak ranting, ranting dan PAC.

Tabel 4. 1 Jenjang Kaderisasi Partai

JENJANG KADERISASI PARTAI		
Jenjang	Level	Wilayah
Pratama	Anak Ranting, Ranting, PAC dan DPC	Daerah RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota
Madya	DPD	Daerah Provinsi

Utama	DPP	Daerah Nasional
Guru Kader/Pendidik	DPP	Daerah Nasional

Sumber: diolah oleh penulis

Namun, lebih lanjut narasumber menyatakan bahwa PDI-Perjuangan juga melakukan penjaringan anggota melalui rekrutmen dari eksternal.

“Meskipun partai sudah mempunyai pasukan, dalam hal ini ialah pengurus struktural. Namun, partai tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu kami juga merangkul kelompok-kelompok secara kolektif untuk merekrut massa seperti Serikat Pekerja, lembaga-lembaga keagamaan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, kami memaksimalkan sayap-sayap partai untuk melakukan pendekatan tersebut” (Wawancara Asep Saefullah, Wakil Ketua Bid. Kaderisasi & Ideologi DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 9 Mei 2023).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui upaya PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dalam menjalankan kaderisasi tidak hanya memaksimalkan jenjang kaderisasi yang ada di internal, tetapi juga mencoba merekrut sumber anggota atau kader baru dari kelompok-kelompok eksternal dalam rangka memperkuat basis massa partai. Dalam konteks pelembagaan partai, hal ini menunjukkan implementasi peranan fungsi partai sebagai rekrutmen politik sudah berjalan dengan baik. Karena juga memberikan kesempatan kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam wadah partai politik untuk ber-demokrasi.

Namun, seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada pemilu 2019 kurang maksimalnya rekrutmen caleg mempengaruhi suara PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon. Jika mengamati pola rekrutmen dari eksternal PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon seperti yang digambarkan diatas, maka dapat kita lihat kurangnya inovasi partai dalam mengenalkan platform dan ideologi partai kepada

calon anggotanya. Hal ini akan berdampak pada rendahnya militansi anggota atau kader-kader baru terhadap partai yang dalam prakteknya mereka bergabung hanya karena atas dasar pencalegan semata. Hal ini menunjukkan bahwa proses upaya merekrut kader dari eksternal dalam konteks pencalegan belum berjalan dengan baik.

Dari hasil penelitian diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan untuk kader dan pengurus partai dilaksanakan secara intensif melalui berbagai mekanisme dan prosedur sesuai AD/ART partai. Dari sisi program, terlihat PDI-Perjuangan memiliki arah yang jelas untuk melakukan pengembangan dalam peningkatan kompetensi SDM partai yang diturunkan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Sebagai partai politik, PDI-Perjuangan patut mendapat apresiasi dibandingkan dengan pragmatisme banyak partai yang hanya berorientasi pada jumlah kader, PDI-Perjuangan mampu menerapkan model kaderisasi yang terstruktur dan sistematis bagi kader internalnya. Namun, perlu dilakukan adanya pembaharuan dalam sistem kaderisasi guna mengoptimalkan kader-kader yang akan ditugaskan menjadi pejabat publik.

3. Kesolidan (Keutuhan) Partai

Dari hasil penelitian dengan beberapa wawancara yang telah dilakukan, bahwa dari segi keutuhan partai PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon relatif solid. Dalam konteks pelembagaan partai — yakni fungsi partai dalam menjalankan manajemen konflik, PDI-Perjuangan memiliki mekanisme dalam menyelesaikan suatu konflik maupun permasalahan. Seperti yang dituangkan dalam Bagian Keempat Pasal 10 Ayat 4 AD/ART PDIP Tentang Penegakan Disiplin Partai, bahwa penegakan disiplin partai dilaksanakan oleh Bidang Kehormatan Partai pada tingkat DPP Partai, DPD Partai dan DPC Partai atas dasar putusan Komite Etik dan Disiplin Partai.

Dalam berjalannya PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon selama ini, relatif belum ada konflik atau permasalahan yang berujung pada perpecahan internal. Meski begitu, pada tahun 2018 pernah terjadi peristiwa yang cukup mengganggu

jalannya roda organisasi yakni peristiwa ditangkapnya kader PDIP, Sunjaya Purwadisastra yang juga Bupati Cirebon terpilih periode 2019-2024 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti yang dikatakan oleh narasumber berikut.

“Sejauh ini belum ada terjadi konflik yang berujung perpecahan internal apalagi sampai menimbulkan dualisme kepengurusan. Pada tingkat DPC, kita juga mempunyai mekanisme internal dalam menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan melalui rapat pleno DPC yang sesuai dengan peraturan dan AD/ART partai. Akan tetapi, pada tahun 2018 Bupati Cirebon yang juga merupakan kader PDIP ditangkap oleh KPK. Sehingga pada saat itu, internal sedikit terguncang dengan timbulnya pro-kontra dalam menyikapi peristiwa tersebut” (Wawancara Aan Setyawan, Wakil Ketua Bid. Organisasi DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 8 Mei 2023).

“Peristiwa ditangkapnya Sunjaya berdampak pada penurunan suara PDIP pada pemilu 2019. Bahkan, jika ditarik mundur sebelum peristiwa ditangkapnya Sunjaya sudah ada kader PDIP yang juga tersangkut kasus hukum yaitu Gotas, Wakil Bupati Cirebon. Pada peristiwa-peristiwa tersebut memang respon kader PDIP cukup kaget apalagi ini mengganggu persiapan jalannya pemilu. Namun gejolak tersebut mampu diredam melalui konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan sehingga soliditas internal mampu dijaga sampai pemilu 2019” (Wawancara Ali Jahari, Bendahara DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 9 Mei 2023).

Berdasarkan pendapat kedua narasumber diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi kesolidan (keutuhan) partai relatif tidak ada konflik atau perpecahan yang terjadi. Internal PDI-Perjuangan Kab. Cirebon sudah mempunyai mekanisme dan prosedur yang mengatur apabila terjadi suatu konflik melalui penegakan disiplin partai yang diatur dalam AD/ART Partai. Meskipun diakui oleh pengurus bahwa terjadi peristiwa dimana beberapa kadernya yang terjerat kasus hukum cukup

mengganggu jalannya roda organisasi, tetapi tidak terlalu berdampak terhadap stabilitas dan kesolidan internal partai. Namun, pada sisi lain peristiwa kasus hukum tersebut berdampak pada perolehan suara PDIP di Kabupaten Cirebon pada pemilu 2019. Penulis menganalisis hal ini disebabkan oleh fokus kader dan internal yang terganggu akibat kasus hukum tersebut sehingga mengganggu jalannya mesin partai untuk persiapan pemilu. Alih-alih menentukan strategi untuk mengembalikan kepercayaan publik dalam pemilu 2019, fokus seluruh kader pada saat itu lebih untuk menjaga kestabilan dan kesolidan partai.

B. Dimensi Identitas Nilai

Menurut Randall dan Svasand (2002), suatu partai dapat dikatakan melembaga dalam hal identitas nilai jika partai tersebut telah berhasil membangun basis sosial yang merupakan lapisan sosial atau golongan masyarakat yang secara loyal mendukung partai tersebut. Dukungan ini tidak hanya didasarkan pada penerimaan materi tertentu dari partai, tetapi lebih karena orientasi politik partai tersebut sejalan dengan ideologi atau platform partai tersebut.

Identitas nilai merupakan inti dari ideologi sebuah partai politik. Identitas nilai mencerminkan seperangkat prinsip, nilai, dan keyakinan yang menjadi dasar bagi pandangan politik dan tujuan partai. Dalam pelembagaan partai politik, identitas nilai diartikulasikan melalui dokumen-dokumen seperti konstitusi partai, manifesto, atau program partai. Identitas nilai yang kuat membantu membedakan partai politik satu dengan yang lain, serta memberikan arah dan fokus dalam proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan partai.

Dimensi ini menjadi penting dalam konteks pelembagaan partai karena ini menunjukkan sejauh mana hubungan antara partai politik dengan kelompok tertentu, dalam hal ini dependensi partai politik pada kelompok sosial tertentu untuk menggalang basis dukungan partai. Indikator dimensi ini terlihat dari upaya partai dalam menjaga hubungan dengan konstituennya, kemampuan berinteraksi dengan

kelompok masyarakat serta strategi pendekatan yang dilakukan untuk menyampaikan ideologi dan platform partai.

1. Basis Dukungan Partai

Sejarah PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari faktor historis. Pada era Soekarno, wilayah Cirebon merupakan basis pendukung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hingga akhirnya berubah menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Seperti halnya disampaikan oleh narasumber berikut.

“Secara historis, sedikit banyak kultur politik masyarakat di Kabupaten Cirebon dipengaruhi oleh ideologi marhaenisme PNI pada era Soekarno. Cirebon pada masa itu merupakan basis pendukung PNI yang kemudian secara turun temurun menjadi basis PDIP. Apalagi, kondisi sosial masyarakat Cirebon sebagian besar mata pencahariannya adalah petani, nelayan, buruh yang secara preferensi ideologi marhaenisme lebih dekat kepada mereka. Sehingga dalam pemilu, segmen pemilih loyal PDIP Kabupaten Cirebon adalah wong cilik baik seperti petani, nelayan, buruh dan pedagang kecil. Pendekatan yang dilakukan dalam meng-implementasi-kan ideologi partai kepada masyarakat adalah melalui program kerakyatan yang dilakukan oleh tiga pilar partai; Legislatif, Eksekutif dan Struktural. Contoh spesifik yang dilakukan terkait program kerakyatan tersebut adalah seperti menggratiskan biaya kesehatan, pembuatan kartu sehat, bantuan sosial dan lain sebagainya, yang ini dijalankan oleh tiga pilar partai tersebut” (Wawancara Asep Saefullah, Wakil Ketua Bid. Kaderisasi & Ideologi DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 9 Mei 2023).

“Total desa di Kabupaten Cirebon berjumlah kurang lebih 412 desa, dimana masyarakatnya tidak jauh dari buruh, tani dan nelayan. Hal ini yang kemudian menjadi fokus prioritas program PDIP untuk menysasar kelompok-kelompok

tersebut karena secara kedekatan ideologi, PDIP lebih dekat dengan mereka. Sehingga nantinya kelompok-kelompok ini dapat menjadi basis dukungan kuat sebagai instrumen kemenangan pemilu walau tidak berkaitan langsung dengan struktural partai. Akan tetapi, memang harus diakui pada pemilu 2019 kemarin banyak program yang tidak fokus dan tidak sesuai harapan masyarakat. Ditambah stigma negatif yang tercipta akibat kasus-kasus yang menimpa PDIP akhirnya hal tersebut mempengaruhi suara PDIP di Kabupaten Cirebon” (Wawancara Bejo Kasiyono, Wakil Ketua Bid. Buruh Tani & Nelayan DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 8 Mei 2023).

Berdasarkan pernyataan kedua narasumber diatas, dapat diketahui kiprah PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon telah berlangsung sejak lama dalam menurunkan ideologi partai kepada generasi penerus. Hal ini menunjukkan PDIP telah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat Kabupaten Cirebon khususnya wong cilik. Strategi pembumian ideologi partai kepada masyarakat juga dilakukan untuk menggalang ataupun merawat basis dukungan partai melalui kader-kadernya yang duduk di posisi legislatif, eksekutif dan struktural. Khususnya, kepada kelompok-kelompok buruh, tani, nelayan dan pedagang kecil yang memang secara kondisi sosial merupakan kelompok mayoritas di Kabupaten Cirebon. Namun demikian, pada momen menjelang pemilu 2019 diakui oleh pengurus banyak program atau kebijakan yang tidak berkesinambungan terhadap kebutuhan masyarakat sehingga berdampak pada perolehan suara PDIP di Kabupaten Cirebon yang menurun.

“Berkaitan dengan basis dukungan PDIP Kabupaten Cirebon khususnya di Kecamatan Klangeran, segmen pemilih atau basis militan kami memang di dominasi oleh kalangan wong cilik. Tugas kami di PAC adalah menampung aspirasi masyarakat yang umumnya terkait dengan pelayanan kesehatan, yang kemudian kami sampaikan kepada kader PDIP yang duduk di legislatif dan eksekutif. Namun, kami kesulitan untuk menyentuh masyarakat yang tinggal di perumahan, ataupun yang mungkin secara kelas ekonomi menengah keatas.

Hal ini juga yang menjadi salah satu kendala dalam meraih basis dukungan partai” (Wawancara Syarifudin, Sekretaris PAC PDIP Kec. Klangean, 10 Mei 2023).

Dari hasil penelitian dengan beberapa wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dalam menanamkan identitas nilai sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya basis sosial yang loyal terhadap partai yang didominasi oleh kaum wong cilik seperti buruh, tani, nelayan, pedagang kecil dan lain sebagainya. Sejalan dengan upaya PDI-Perjuangan yang fokus programnya adalah terkait program kerakyatan dengan menyasar kaum wong cilik tersebut. Akan tetapi, kendala juga ditemui di lapangan dalam upaya melakukan pendekatan terhadap masyarakat kelas menengah keatas. Hal ini menunjukkan ideologi atau platform yang diusung oleh PDI-Perjuangan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Perlu adanya upaya atau strategi khusus untuk menarik simpati masyarakat diluar kaum wong cilik agar PDI-Perjuangan tidak memiliki ketergantungan (dependensi) pada kelompok masyarakat tertentu.

Penulis menganalisa identitas nilai partai politik berperan penting dalam mewakili nilai-nilai dan aspirasi pemilih. Pemilih memilih partai politik berdasarkan kesesuaian nilai-nilai yang dipromosikan oleh partai tersebut. Dalam perspektif pelembagaan partai politik, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon sudah berupaya mempertahankan dan mengartikulasikan identitas nilai mereka dengan jelas agar dapat menarik dan mempertahankan dukungan pemilih yang sejalan dengan nilai-nilai partai. Namun, aspek representasi nilai pemilih ini juga berdampak pada keberlanjutan partai dan pertumbuhan basis dukungan selain dari kaum wong cilik.

Maka kemudian, selain identitas nilai merupakan landasan penting bagi pelembagaan partai politik, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon juga harus mempertimbangkan fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi perubahan

sosial dan politik. PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon perlu mampu menginterpretasikan ulang dan menyesuaikan identitas nilai mereka dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Fleksibilitas ini memungkinkan partai untuk tetap relevan dan mempertahankan dukungan pemilih, sambil mempertahankan inti nilai-nilai yang menjadi identitas partai.

Identitas nilai juga mempengaruhi interaksi antara partai politik dalam sistem politik yang lebih luas. Partai dengan identitas nilai yang serupa cenderung memiliki kesamaan tujuan dan pandangan, yang dapat mengarah pada koalisi atau kerja sama politik. Di sisi lain, partai dengan identitas nilai yang bertentangan mungkin menghadapi konflik dan persaingan politik yang lebih kuat. Dalam beberapa kali pemilihan kepala daerah, seringkali PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon mengusung calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diisi oleh kader partainya alias koalisi tunggal. Partai lain hanya memainkan peran sebatas menjadi pengusung. Meski hal ini merupakan ranah yang sifatnya politis, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon perlu mengedepankan keberagaman identitas nilai dari setiap partai politik untuk memainkan peran penting dalam membentuk aliansi dan dinamika politik antara partai-partai politik di Kabupaten Cirebon. Hal ini dapat membuka kesempatan untuk meraih basis dukungan yang lebih luas.

BAB V

**ANALISIS DIMENSI OTONOMI PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN
CITRA PUBLIK PELEMBAGAAN PARTAI DEMOKRASI INDONESIA-
PERJUANGAN DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2014-2019**

Dalam bab ini, penulis akan menggambarkan hasil analisis temuan data lapangan yang membahas pelebagaan PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon pada periode 2014-2019. Analisis ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi dan dikumpulkan melalui wawancara, studi literatur, serta berbagai dokumen pendukung. Bab ini akan memaparkan analisis yang mendalam, dengan fokus pada aspek internal teori pelebagaan partai menurut Randall dan Svasand, yakni pada dimensi otonomi pengambilan keputusan dan persepsi publik.

A. Dimensi Otonomi Pengambilan Keputusan

Surbakti (2003) berpendapat bahwa derajat otonomi dalam pengambilan keputusan partai politik dipengaruhi oleh hubungan antara partai dan aktor di luar partai, baik dengan sumber kekuasaan tertentu (pemimpin, pemerintah) maupun sumber sumber daya (pengusaha, pemimpin, lembaga negara atau eksternal) dan sumber dukungan massa (organisasi publik). Pendapat ini juga sama dengan pandangan Huntington bahwa otonomi partai merupakan salah satu indikator pelebagaan. Partai akan memiliki otonomi pengambilan keputusan ketika pendanaan untuk operasional partai diperoleh melalui iuran keanggotaan, iuran administrasi dan iuran aktivis.

1. Otonomi Keuangan

Menurut Bab VIII Tentang Keuangan dan Perbendaharaan Partai pasal 90 ayat 2 AD/ART PDI-Perjuangan, harta kekayaan partai diperoleh dari:

- a. Uang pangkal dan iuran anggota partai;
- b. Sumbangan yang tidak mengikat;
- c. Hibah;

- d. Hibah Negara; dan
- e. Pendapatan lainnya yang sah.

PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon mempunyai pendanaan tersendiri dalam menunjang berjalannya kegiatan partai. Terdapat satu pos pendanaan yakni iuran gotong royong atau dana abadi yang dibebankan kepada tiga pilar partai; legislatif, eksekutif dan struktural. Pendanaan ini dapat digunakan apabila partai mengadakan suatu kegiatan hingga dalam konteks pemilu, dapat digunakan sebagai pendanaan biaya saksi dan relawan. Seperti yang dikatakan narasumber dibawah ini.

“Untuk sumber kas partai, pada tingkat DPC ada yang namanya iuran gotong royong. Iuran ini diberikan oleh kader-kader yang duduk sebagai Anggota DPRD, Kepala Daerah ataupun struktural DPC. Untuk jumlah iurannya bervariasi namun sifatnya tentatif. Gunanya adalah ketika partai mengadakan kegiatan seperti rapat, bantuan untuk aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui pos anggaran iuran gotong royong ini. Bahkan ketika pemilu, seluruh biaya saksi atau relawan pemenangan partai juga menggunakan anggaran ini. Namun, selain adanya kas partai yang diperoleh dari iuran gotong royong, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon juga mendapat alokasi bantuan dari APBD sejumlah Rp. 1.250,- / suara.” (Wawancara H. Mustofa, Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 11 Mei 2023).

“Kalau pada tingkat DPC ada yang namanya iuran gotong royong. Kalau di tingkat PAC sendiri tidak ada. Namun, ketika PAC akan membuat suatu kegiatan biasanya membuat proposal pendanaan kegiatan yang kemudian diserahkan kepada DPC. Jadi, bantuan pendanaan dari DPC untuk PAC sifatnya kondisional tidak ada patokan tertentu” (Wawancara Syarifudin, Sekretaris PAC PDIP Kec. Klangeran, 10 Mei 2023).

Berdasarkan pendapat kedua narasumber diatas, dapat diketahui bahwa sumber pendanaan yang menjadi kekuatan kemandirian keuangan PDI-Perjuangan

Kabupaten Cirebon berasal dari iuran berasal dari iuran anggota yang dinamakan iuran gotong royong (dana abadi). Iuran ini diperoleh dari tiga pilar partai, yakni anggota atau kader yang duduk di lembaga legislatif, eksekutif dan struktural. Dana gotong royong ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan partai yang diselenggarakan di tingkat DPC sampai Anak Ranting. Selain sumber kas partai berasal dari iuran gotong royong, juga terdapat bantuan partai politik dari APBD. Secara administrasi, bantuan tersebut sudah merupakan hak dari partai politik di Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon No. 75 Tahun 2009 tentang Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Cirebon. Dalam konteks pelebagaan partai, hal ini menunjukkan PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon relatif mandiri dalam otonomi keuangan karena tidak bergantung pada bantuan donatur atau pihak eksternal yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

2. Otonomi Pengambilan Keputusan

Seperti telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, dari aspek internal PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon memiliki mekanisme dan prosedur sesuai AD/ART Partai dalam merumuskan suatu keputusan atau kebijakan. Seluruh struktural dari tingkat DPC hingga Anak Ranting juga berpartisipasi aktif dalam setiap musyawarah partai. Iuran anggota yang digunakan untuk sumber pembiayaan partai menunjukkan relatif tidak ada gejala bergantung pada aktor atau relasi di luar partai yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dari aspek eksternal, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon cenderung tidak mudah di intervensi oleh pihak luar karena sebelum pemilu 2019, mereka merupakan partai yang dominan di tingkat eksekutif dan legislatif sehingga kekuasaan mereka sudah mengakar dan terorganisir. Kekuatan partai ini yang membuat PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan. Seperti halnya disampaikan oleh narasumber berikut.

“Kami di Cirebon sudah bertahun-tahun membangun kekuatan politik yang kuat dari mulai lapisan bawah sampai level keatas. Ini menunjukkan kami mempunyai nilai tawar yang tidak mudah di intervensi oleh pihak manapun dalam setiap keputusan yang bersifat strategis. Namun, tentunya kami tidak serta merta menutup diri, merasa eksklusif dari pihak yang ingin bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon. Tetap ada nilai-nilai dan etika yang kami jaga selama pihak tersebut mempunyai iktikad yang baik khususnya dalam bidang pemerintahan yang menyangkut hajat hidup banyak orang” (Wawancara H. Mustofa, Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 11 Mei 2023).

Namun demikian, dari kedua aspek diatas juga memiliki kelemahan. Kelemahan dari sisi internal ialah, pendanaan yang mengandalkan iuran dari beberapa orang tertentu saja (tiga pilar partai) dapat membuat kader di tingkat bawah atau *grass root* tidak memiliki peran utuh dalam merumuskan suatu kebijakan. Meskipun dalam proses pengambilan keputusan ada mekanisme musyawarah, bila ada kebijakan yang sifatnya politis dan urgen, kepentingan para tiga pilar partai ini bisa saja mempengaruhi hasil keputusan atau kebijakan atas dasar jasa mereka terhadap partai. Pada titik inilah, otonomi partai dalam pengambilan keputusan akan mengalami hambatan, dimana kepentingan segelintir elit partai dapat meng-intervensi suatu kebijakan atau keputusan. Pusat kekuasaan tumbuh pada sekitar sedikit elite utama di pucuk organisasi partai, sehingga sulit untuk diterapkannya sistem otonomi kepartaian. Kepentingan dan kenikmatan partai pun kurang terdistribusikan ke luar lingkaran elite utama itu. Akhirnya, operasi partai terkendali di tangan orang-orang DPC (Prihatmoko, 2022).

Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2019) menunjukkan hasil dimana basis dukungan Partai Kebangkitan Bangsa tidak dapat dilepaskan dari unsur eksternal yang melekat dalam Partai Kebangkitan Bangsa, yakni organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama sehingga kemandirian Partai Kebangkitan Bangsa

Kabupaten Kendal tidak bisa dilepaskan dari intervensi eksternal dalam beberapa keputusan.

Penulis menganalisa pada dimensi otonomi pengambilan keputusan dalam perspektif pelebagaan partai politik adalah aspek penting dalam menjaga kemandirian dan keberlanjutan PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon. Beberapa aspek yang bisa dicapai ialah sebagai berikut.

a) Representasi kepentingan anggota: Otonomi pengambilan keputusan memungkinkan PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon untuk lebih efektif merepresentasikan kepentingan dan aspirasi anggota atau kader mereka. Setiap partai politik memiliki basis dukungan yang beragam, dan dengan memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan, partai dapat lebih responsif terhadap keinginan dan kebutuhan anggota mereka. Hal ini memungkinkan PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon untuk dapat membangun platform politik yang lebih solid dan relevan dengan basis dukungan mereka yang telah dibangun selama bertahun-tahun.

b) Inovasi kebijakan: Otonomi dalam pengambilan keputusan juga memungkinkan PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap perubahan sosial dan politik. Seperti yang telah dijelaskan pada bab diatas, fleksibilitas dan adaptabilitas menjadi kunci dalam memperoleh basis dukungan yang lebih luas. Dalam situasi di mana partai memiliki otonomi yang cukup, pemimpin partai dapat mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi partai, tanpa terjebak dalam tekanan politik dan pengaruh eksternal yang berpotensi menghambat proses kreatif dan inovatif.

c) Akuntabilitas internal: Dimensi otonomi pengambilan keputusan juga memungkinkan terciptanya akuntabilitas internal yang lebih baik dalam partai politik. Dalam struktur yang otonom, partai politik dapat mengembangkan

mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang efektif antara berbagai level kepemimpinan dan anggota partai. Hal ini membantu mencegah kecenderungan dominasi atau otoritarianisme dari beberapa individu atau kelompok kepentingan dalam partai.

d) Keberlanjutan partai: Otonomi pengambilan keputusan juga penting untuk menjaga keberlanjutan PDI-Perjuangan dalam kiprah politiknya di Kabupaten Cirebon. Dalam situasi di mana partai politik terlalu bergantung pada keputusan individu atau kelompok luar yang tidak terkait langsung dengan partai, partai dapat mengalami instabilitas atau bahkan pembubaran jika ada perubahan dalam kekuasaan atau prioritas. Dengan memiliki otonomi pengambilan keputusan, partai politik dapat menjaga integritas dan kemandirian mereka sebagai entitas politik yang berkelanjutan.

Dalam kesimpulannya, dimensi otonomi pengambilan keputusan dalam perspektif pelebagaan partai politik memiliki peran penting dalam mendorong representasi anggota yang baik, inovasi kebijakan, akuntabilitas internal, keberlanjutan partai, dan kepercayaan publik. Dalam konteks demokrasi, partai politik yang memiliki otonomi pengambilan keputusan yang sehat dapat berfungsi sebagai sarana yang efektif dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan membentuk arah kebijakan publik.

B. Dimensi Pengetahuan (Citra) Publik

Dimensi pengetahuan (citra) publik terhadap partai politik mengacu pada tertanam atau tidaknya ideologi partai politik dalam kesadaran masyarakat. Sebuah partai politik dapat dikatakan sudah melembaga dari segi pengetahuan publik manakala masyarakat mendefinisikan karakter dan aktifitas partai politik itu sesuai identitas nilai (*platform*) yang diusung oleh partai tersebut. Pada prinsipnya, dimensi pengetahuan publik menjelaskan sejauh mana upaya partai politik untuk

menampilkan citra diri (pencitraan) sebaik mungkin kepada masyarakat. Tujuan dari pencitraan itu ialah untuk meraih dukungan elektoral partai.

1. Kiprah Partai dalam Politik Lokal

Pengukuran tingkat pengetahuan publik terhadap suatu partai dapat dilakukan dengan melihat bagaimana partai tersebut berpolitik di tingkat lokal. Salah satu faktor yang mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap suatu partai adalah pengetahuan mereka tentang eksistensi partai tersebut dan pemahaman mereka mengenai cara partai tersebut berperan serta dalam politik serta sejalan dengan ideologi partai tersebut. PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon berhasil membuktikan popularitasnya pada tahun 2014 dengan meraih suara terbanyak dalam pemilihan umum dan menguasai jumlah kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Cirebon dengan total 11 kursi.

PDI-Perjuangan juga berhasil menempatkan kadernya sebagai Kepala Daerah. Dari mulai sejak 2003 saat pilkada langsung pertama kalinya diselenggarakan di Kabupaten Cirebon hingga pada tahun 2018. Pemilihan Kepala Daerah yang terakhir yakni tahun 2018 dimenangkan pasangan calon Sunjaya Purwadi Sastra dan Imron Rosyadi yang terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Cirebon periode 2018-2023 yang diusung oleh koalisi tunggal PDI-Perjuangan. Kemenangan ini menegaskan kembali dominasi PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon setelah sebelumnya sejak tahun 2003 posisi Bupati atau Wakil Bupati Cirebon dijabat oleh kader yang berasal dari PDI-Perjuangan.

Namun sejak 2014, beberapa peristiwa kasus hukum yang menyangkut kader PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon menjadi catatan dan fenomena tersendiri di masyarakat. Fenomena yang menarik adalah setelah Pemilukada pada tahun 2018, Bupati Cirebon terpilih Sunjaya Purwadi Sastra ditangkap oleh KPK atas dugaan kasus suap perizinan proyek dan jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon. Peristiwa ini sontak menggemparkan masyarakat Cirebon karena Sunjaya

merupakan Bupati petahana yang terpilih kembali, namun belum dilantik dan sudah ditangkap oleh KPK. Sejumlah masyarakat dan PNS meluapkan kegembiraannya atas penangkapan Bupati Cirebon oleh KPK. Masyarakat mendukung penuh langkah hukum KPK untuk mengungkap kasus tersebut dikarenakan selama kepemimpinan Bupati Cirebon dinilai cacat dan penuh praktik korupsi (Sudirman, 2018).

Tabel 5. 1 Peristiwa Kasus Hukum

Kader PDI-Perjuangan Kab. Cirebon Kurun Waktu 2014-2019

No	Nama	Jabatan	Kasus	Tahun
1.	Tasiya Soemadi Al-Gotas	Wakil Bupati Cirebon 2013-2018	Korupsi Dana Bansos	2015
2.	Aan Setyawan	Anggota DPRD Kab. Cirebon	Judi	2016
3.	Sunjaya Purwadisastra	Bupati Cirebon terpilih 2018-2023	Korupsi Jual Beli Jabatan dan TPPU	2018

Sumber: diolah oleh penulis

Pasca ditangkapnya Bupati terpilih yang diusung oleh PDI-Perjuangan pada tahun 2018, PDI-Perjuangan mengalami kehilangan dominasi untuk pertama kalinya pada pemilu legislatif 2019. Hasil perolehan suara di Kabupaten Cirebon dimenangkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berhasil menyalip posisi PDI-Perjuangan dan keluar sebagai pemenang pemilu. Kemenangan PKB ini sekaligus menyudahi dominasi kekuasaan PDI-Perjuangan pada tingkat legislatif selama dua puluh tahun di Kabupaten Cirebon dengan hanya mendapat 8 kursi.

2. Kiprah Partai di Masyarakat

Saat ini proses pencitraan partai politik dilakukan melalui berbagai cara. Apabila dikaitkan dengan konteks kiprah partai di masyarakat, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon mempunyai cara untuk meraih simpati dan perhatian masyarakat, salah satunya melalui berbagai program dan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat. Sebutan ‘partai wong cilik’ bagi PDI-Perjuangan dan ‘kandang banteng’ di wilayah Kabupaten Cirebon menunjukkan eksistensi dan popularitas PDI-Perjuangan di Kabupaten Cirebon sangat terlihat sehingga berhasil menghantarkannya menjadi partai besar di Kabupaten Cirebon. Tentunya dalam menggapai keberhasilan tersebut, peran kader partai yang menduduki jabatan legislatif dan eksekutif menjadi vital untuk dapat membumikan ideologi dan nilai-nilai partai yang kemudian diterjemahkan menjadi program dan arah kebijakan publik. Seperti halnya disampaikan oleh narasumber berikut.

“PDIP di Cirebon sendiri memiliki 8 kursi di DPRD, kemudian jabatan Bupati dan Wakil Bupati juga diisi oleh kader PDIP. Artinya apa? PDIP punya banyak sekali peluang dan kesempatan untuk ikut andil membangun masyarakat Cirebon. Partai menugaskan kepada kita yang duduk di legislatif dan eksekutif untuk membumikan ideologi partai di wilayah masing-masing. Instruksi partai itu kita buat menjadi program yang tentunya harus memperhatikan aspirasi masyarakat. Saya sendiri sebagai anggota DPRD setiap malam selalu menerima keluhan dan aspirasi warga. Tentu apabila ada suatu hal yang urgen, tindak lanjutnya juga harus berkolaborasi dengan eksekutif karena sifat kami di legislatif meng-inventarisir dan mengadvokasi setiap aspirasi yang kemudian diteruskan kepada eksekutif selaku eksekutor. Tapi, pada intinya kami senantiasa memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam setiap gerak langkah kebijakan partai” (Wawancara H. Mustofa, Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 11 Mei 2023).

Salah satu contoh program yang cukup populer pada masa kepemimpinan Sunjaya selaku Bupati Cirebon pada saat itu ialah program Lomba Desa. Pemerintah daerah Kabupaten Cirebon seringkali mengadakan program-program lomba desa sebagai bagian dari upaya untuk mendorong desa-desa agar lebih aktif dalam pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Program tersebut dapat melibatkan berbagai aspek, seperti kebersihan desa, pelayanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan lingkungan, pengembangan pariwisata, pengembangan ekonomi lokal, dan partisipasi masyarakat. Seperti halnya disampaikan oleh narasumber berikut

“Sebagai respons terhadap kebutuhan pembangunan dan pengejaran ketertinggalan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga aktif mendorong motivasi desa-desa untuk mempercepat pembangunan. Salah satu langkah yang diambil adalah memberikan tambahan dana stimulan pembangunan kepada desa-desa yang masuk dalam 12 besar Lomba Desa tingkat Kabupaten Cirebon. Juara dalam lomba ini akan menerima hadiah sebesar Rp 50 juta. Selain itu, juara juga berhak menerima dana stimulan pembangunan sebesar Rp 250 juta.” (Wawancara H. Mustofa, Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 11 Mei 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dalam pendekatan kepada masyarakat dilakukan melalui program dan kebijakan yang dibuat. Setiap kader yang duduk di legislatif ataupun eksekutif harus mampu kolaborasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat. Jika merujuk pada konteks kelembagaan, peran kader dalam menyampaikan ideologi partai sesuai instruksi dan amanat AD/ART partai sudah berjalan dengan baik.

Dalam proses demokrasi, ‘imbalan’ dari apa yang sudah dilakukan oleh partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat adalah perolehan suara dan

dukungan elektoral partai yang meningkat. Namun demikian, seperti telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya permasalahan kasus hukum yang menimpa beberapa kader PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon juga membuat stigma masyarakat terhadap partai menjadi negatif. Diakui oleh pengurus, hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan suara partai pada pemilu 2019. Seperti yang disampaikan dibawah ini.

“Jelas mas. Beberapa kader PDIP yang ditangkap karena kasus hukum menimbulkan pandangan negatif di masyarakat. Apalagi ditangkapnya Bupati Sunjaya saat itu yang merupakan pemimpin tertinggi di Kabupaten Cirebon memiliki dampak yang luas. Salah satunya ya penurunan suara partai pada pemilu 2019. Caleg kita juga akhirnya banyak yang terkena citra buruknya. Kami juga mengakui peristiwa tersebut merupakan musibah yang seharusnya memiliki kader sebagai Bupati itu menjadi jembatan emas untuk meraih kemenangan, pada akhirnya harus runtuh seketika” (Wawancara H. Mustofa, Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020, 11 Mei 2023).

Pemberitaan media terhadap berbagai kasus hukum yang menimpa kader PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon juga berperan penting dalam mempengaruhi kredibilitas dan citra partai di masyarakat yang mengakibatkan dukungan elektoral terhadap partai menurun. Seperti dilansir detik.com,

“OTT KPK, Sunjaya Tengah Tunggu Pelantikan Bupati Periode Ke-2: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dalam operasi tangkap tangan (OTT). Sunjaya merupakan petahana yang berhasil meraih kemenangan pada Pilkada serentak 2018 lalu. Sunjaya berpasangan dengan Imron Rosyadi. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan ini berhasil meraih 319.630 suara berdasarkan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara Pilbup Cirebon yang dilakukan KPU Kabupaten Cirebon pada Juli lalu. Sunjaya tinggal menunggu pelantikannya sebagai Bupati

Cirebon terpilih periode 2019-2024. Sebelum dilantik, ternyata Sunjaya terjerat OTT KPK. Sunjaya diduga menerima suap jual-beli jabatan”.

“Euforia Masyarakat dan PNS Usai KPK Tangkap Bupati Cirebon : Sejumlah masyarakat dan pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Cirebon meluapkan kegembiraannya atas penangkapan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berdemonstrasi di depan kantor Bupati Cirebon, Jalan Sunan Kalijaga, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Massa mendukung penuh langkah hukum KPK untuk mengungkap praktik suap dan gratifikasi yang menjerat Sunjaya. Salah seorang PNS, Juju Hermanto mengatakan, banyak PNS di lingkungan Pemkab Cirebon merasa terzalimi selama masa kepemimpinan Sunjaya. Pasalnya, menurut dia, Sunjaya terlalu sering memutuskan untuk rotasi dan mutasi jabatan.

Dari hasil penelitian dengan wawancara diatas, dapat diketahui pada dimensi pengetahuan (citra) publik PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon sudah melakukan upaya dalam menampilkan citra partai sebaik mungkin melalui saluran-saluran komunikasi politik yang ada. Strategi yang dilakukan PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon adalah melalui pembumian ideologi partai kepada masyarakat yang ditransformasikan menjadi program dan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti contoh program kerakyatan, kesehatan, kepemudaan guna meraih simpati dan dukungan masyarakat. Upaya itu sebenarnya membuahkan hasil, ini dibuktikan dalam setiap pemilu dukungan elektoral terhadap partai selalu didominasi oleh kalangan wong cilik. Hal ini menunjukkan ideologi atau nilai yang diusung PDI-Perjuangan sudah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat.

Namun demikian, upaya yang sudah dibangun dalam menampilkan citra baik partai serta menanamkan nilai dan ideologi partai kepada masyarakat harus dirusak oleh kasus hukum yang menimpa kader PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon itu sendiri. Seperti yang diakui oleh pengurus, kasus-kasus tersebut menimbulkan

dampak negatif bagi stigma dan citra masyarakat terhadap PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon. Hingga pada akhirnya, terjadi penurunan perolehan suara partai pada pemilu 2019.

Penulis menganalisa dimensi citra publik menjadi aspek penting dalam pelembagaan partai yang dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap partai politik. Ketika partai politik memiliki citra yang baik, keputusan dan kiprah maupun arah gerak mereka dianggap lebih murni dan didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan berdasarkan nilai-nilai partai tersebut. Ini membantu menciptakan citra PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon yang konsisten dan terpercaya di mata publik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan legitimasi dan dukungan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kondisi pelebagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Di Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 yang dianalisis berdasarkan teorisasi Randall dan Svasand, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pada dimensi kesisteman, dalam beberapa kebijakan yang strategis, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon masih belum mampu mandiri secara penuh dalam pengambilan keputusan, seperti rekrutmen calon anggota legislatif dan eksekutif di daerah yang harus disetujui oleh tingkat pusat yakni DPP. Aktor utama dalam pengambilan keputusan yakni adalah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Meski hal ini sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang dituangkan dalam peraturan partai dan AD/ART, partai politik yang memiliki tingkat pelebagaan partai yang baik sudah seharusnya melibatkan partisipasi penuh dari setiap kader dan fungsionaris partai. Hal ini guna menciptakan proses demokrasi internal yang bersih dan akuntabel sehingga dapat meminimalisir gejala intervensi dari beberapa kelompok tertentu baik pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan. Selain itu, dari segi kaderisasi, PDI-Perjuangan mampu menunjukkan hasil yang baik dalam konteks pelebagaan partai dimana pola kaderisasi PDI-Perjuangan sudah terstruktur dan sistematis. Begitupun dari segi kesolidan partai, meski dalam kurun waktu 2014-2019 terdapat pergolakan internal di tubuh PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon, namun soliditas internal mampu dijaga dari perpecahan dan faksionalisme internal.

Kedua, dari segi dimensi identitas nilai, upaya PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dalam menanamkan ideologi partai yakni marhaenisme kepada masyarakat sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan basis sosial yang loyal di segmen pemilih kaum wong cilik seperti buruh, tani, nelayan, pedagang kecil dan lain sebagainya. Sejalan dengan upaya PDI-Perjuangan yang fokus programnya adalah terkait program

kerakyatan dengan menyasar kaum wong cilik tersebut. Namun, ideologi atau platform yang diusung oleh PDI-Perjuangan belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat seperti masyarakat kelas menengah keatas dan masyarakat perkotaan. Hal ini menunjukkan kurangnya inovasi dan lemahnya sebagian mesin partai atau kader dalam hal penanaman dan pemahaman ideologi partai bagi masyarakat untuk memperluas basis dukungan.

Ketiga, pada dimensi otonomi pengambilan keputusan, dari aspek internal PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon memiliki mekanisme dan prosedur sesuai AD/ART Partai dalam merumuskan suatu keputusan atau kebijakan. Seluruh struktural dari tingkat DPC hingga Anak Ranting juga berpartisipasi aktif dalam setiap musyawarah partai. Iuran anggota yang digunakan untuk sumber pembiayaan partai menunjukkan relatif tidak ada gejala bergantung pada aktor atau relasi di luar partai yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

Dari aspek eksternal, PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon cenderung tidak mudah di intervensi oleh pihak luar karena sebelum pemilu 2019, mereka merupakan partai yang dominan di tingkat eksekutif dan legislatif sehingga kekuasaan mereka sudah mengakar dan terorganisir. Kekuatan partai ini yang membuat PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon memiliki otonomi dalam pengambilan keputusan.

Meski demikian, dari kedua aspek diatas tetap saja terdapat kelemahan. Pendanaan yang mengandalkan iuran dari beberapa orang tertentu saja (tiga pilar partai) dapat membuat kader di tingkat bawah atau *grass root* tidak memiliki peran utuh dalam merumuskan suatu kebijakan. Pada titik inilah, otonomi partai dalam pengambilan keputusan akan mengalami kendala, dimana kepentingan segelintir elit partai dapat meng-intervensi suatu kebijakan atau keputusan.

Keempat, pada dimensi citra publik PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon sudah melakukan upaya dalam menampilkan citra partai sebaik mungkin melalui saluran-saluran komunikasi politik yang ada. Strategi yang dilakukan PDI-Perjuangan

Kabupaten Cirebon adalah melalui pembumian ideologi partai yakni sosialisme dan marhaenisme kepada masyarakat yang ditransformasikan menjadi program dan kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti contoh program kerakyatan, kesehatan, kepemudaan guna meraih simpati dan dukungan masyarakat. Upaya itu sebenarnya membuahkan hasil, ini dibuktikan dalam setiap pemilu dukungan elektoral terhadap partai selalu didominasi oleh kalangan wong cilik. Hal ini menunjukkan ideologi atau nilai yang diusung PDI-Perjuangan sudah mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat. Namun demikian, upaya yang sudah dibangun dalam menampilkan citra baik partai serta menanamkan nilai dan ideologi partai kepada masyarakat harus dirusak oleh kasus hukum yang menimpa kader PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon itu sendiri. Seperti yang diakui oleh pengurus, kasus-kasus tersebut menimbulkan dampak negatif bagi stigma dan citra masyarakat terhadap PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan sebagai dasar pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya PDI-Perjuangan untuk merefleksikan kembali keputusan-keputusan masa lalu mereka dan beradaptasi dengan perubahan sosial, politik, dan preferensi pemilih di Kabupaten Cirebon. Dengan memahami konsep pelebagaan partai, PDI-Perjuangan dapat mengidentifikasi peluang dan strategi yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan memperoleh kembali kepercayaan pemilih.
2. Perlunya PDI-Perjuangan merespons perubahan dinamika politik dan merenungkan keputusan-keputusan masa lalu serta memperbaiki citra dan kredibilitas mereka di Kabupaten Cirebon. Dengan mengadopsi pendekatan pelebagaan partai dan memperhatikan preferensi pemilih yang terus berubah,

PDI-Perjuangan Kabupaten Cirebon dapat menata organisasinya beriringan dengan upaya membangun kembali kepercayaan pemilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. T. S. 2017. “Dominasi PDI-P di Kota Blitar Tahun 1999-2014”. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya.
- Amalia, L. S. 2013. “Evaluasi Sistem Kepartaian di Era Reformasi”, dalam *Jurnal Penelitian Politik LIPI*, Vol. 10, No. 2.
- Ardi, Wahyu Herianto. 2022. “Faktor Kegagalan Partai Hanura Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Lombok Utara”. Sarjana Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- BPS. 2023. Kabupaten Cirebon dalam Angka. Cirebon
- Dokumen AD/ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2015-2020
- Ekawati. 2017. “Vonis dan Kekalahan Ahok Berefek Luas Terhadap Elektabilitas Partai PDI Perjuangan”, dalam *Jurnal Legalitas* Vol. 2, No. 1.
- Fajari, Farizan. 2017. “Kekalahan *Cambodia People’s Party* di Wilayah Urban Kamboja pada Pemilu Tahun 2013”, dalam *Jurnal Politik* Vol. 2, No. 2.
- Fajri, Choirul dan Dani Fadillah. 2017. “Analisa Kegagalan Komunikasi Politik dalam Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Sleman (Studi Kasus PDI Perjuangan)”, dalam *Channel: Jurnal Komunikasi* Vol. 5, No. 2.
- Huntington, Samuel. P. 2003. *Tertib Politik Di Tengah Pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Katz, R.S dan Crotty, W. 2014. *Handbook Partai Politik*. Bandung: Nusa Media.

Lutfi, Muhammad. 2012. "Pelebagaan Partai Golkar di Tingkat Lokal (Studi Tentang Pelebagaan Partai Golkar di Kabupaten Sinjai Pasca Kekalahan Pada Pemilu 2009)". Sarjana Thesis. Universitas Gadjah Mada.

KPU. Rilis Data KPU. Diakses dari <http://pemilu2019.kpu.go.id>

Marsh, David dan Stoker, Garry. 2017. *Teori dan Metode Dalam Ilmu Politik*. Bandung: Nusa Media.

Maschab, Maschuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Munawar. 2022. "Wacana Pembubaran Partai Politik Korup di Indonesia", dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 9, No. 1.

Novianawati, Dian. 2016. "Dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pada Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Tulungagung". Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya.

Nuryani, Reni dan Priyatno Harsasto. 2018. "Kekalahan Seno Samodro dalam Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2015: Studi Kasus Desa Teter dan Desa Wates Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali", dalam *Jurnal Politics and Government Studies* Vol. 7, No. 3.

OTT KPK, Sunjaya Tengah Tunggu Pelantikan Bupati Periode Ke-2. Diakses dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4272695/ott-kpk-sunjaya-tengah-tunggu-pelantikan-bupati-periode-ke-2>.

PDI-P. Visi Misi PDI-P. Diakses dari <http://pdiperjuangan.id>

Pebriana, I Wayan Agus. 2019. "Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Persaingan Politik di Bali Tahun 1999-2019", dalam *Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika*.

- Prihatmoko, J. Joko. 2022. “Rekrutmen PDIP dalam Pilkada 2020: Antara Strategi Pemenangan dan Pelembagaan Partai Politik”, dalam *Jurnal Spektrum UNWAHAS Semarang* Vol. 19, No. 22.
- Putra, A., Norhuda, N., & Adytyas, N. 2021. “Institusionalisasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kota Palembang”, dalam *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, Vol. 2, No. 1.
- Putriwani, Bella. 2021. “Strategi Politik *Incumbent* dan Faktor Penyebab Kekalahan Pada Pemilihan Legislatif 2019 Kabupaten Bangka”, dalam *Journal of Social and Technology*, Vol. 1, No. 2.
- Santoso, Barana Driya. 2020. “Dominasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kota Surakarta Tahun 2014 – 2019”. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya.
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2014. *Pengantar Ilmu Komunikasi. In: Komunikasi: Signifikansi, Konsep, Dan Sejarah*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Setiadi, Fachri. 2019. “Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2019.” Sarjana thesis, UIN Walisongo Semarang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2003. “Perkembangan Partai Politik di Indonesia”, dalam Henk. S Nordholt & G. Anan (eds.). *Indonesia in Transition Work in Progress*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryana, N., Ardiansyah, A. G., & Manan, F. 2020. ”Pelembagaan Partai Politik: Studi Pada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung Tahun 2019”, dalam *Jurnal Civic Hukum*, Vol 5, No.1.

- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.
- Syafridho, Syawal Ayuza. 2022. “Analisis Penurunan Suara Partai Hanura pada Pemilu Legislatif Kota Padang Tahun 2019 dalam Perspektif Pelembagaan Partai Politik”. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Trianisa, Krisma. 2021. ”Pudarnya Sang Juara: Merosotnya Suara Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif 2014 dan 2019”. Sarjana thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Wamad, Sudirman. 2018. “Euforia Masyarakat dan PNS Usai KPK Tangkap Bupati Cirebon”. Diakses pada Januari 11, 2023 dari <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4283201/euforia-masyarakat-dan-pns-usai-kpk-tangkap-bupati-cirebon>
- Wekke, I. S. 2019. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

LAMPIRAN

Gambar 1: Wawancara dengan Informan, Aan Setyawan
Wakil Ketua Bid. Organisasi DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020



Gambar 2: Wawancara dengan Informan, Bejo Kasiyono

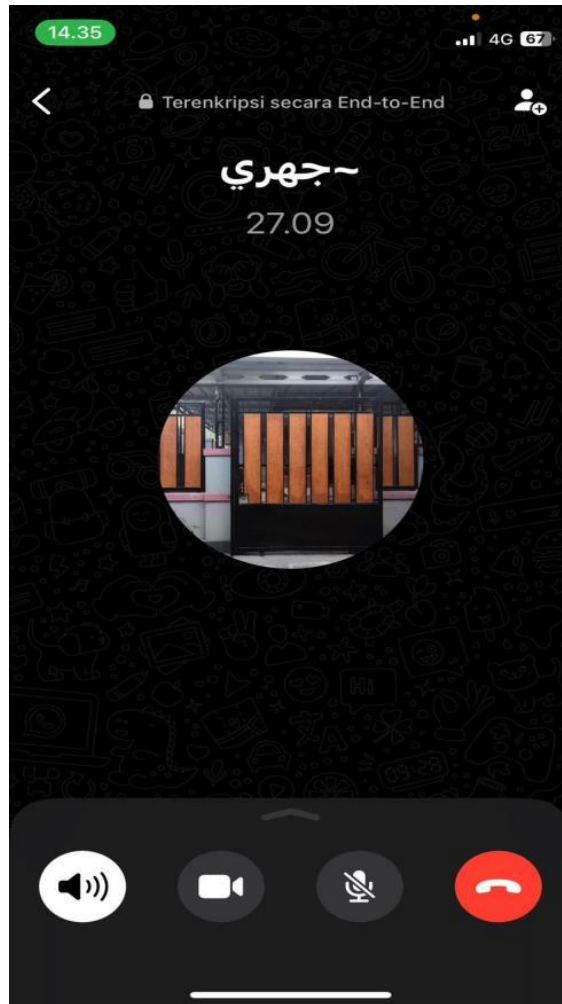
Wakil Ketua Bid. Buruh Tani & Nelayan DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020



Gambar 3: Wawancara dengan Informan, Syarifudin
Sekretaris PAC PDIP Kec. Klangeran



Gambar 4: Wawancara dengan Informan, Ali Jahari
Bendahara DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020




Gambar 5: Wawancara dengan Informan, H. Mustofa
Ketua DPC PDIP Kab. Cirebon Periode 2015-2020



Lampiran Dokumen

Gambar 6: SK DPC PDI-Perjuangan Periode 2015-2020



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPP - PDI PERJUANGAN)**

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
NOMOR : 26.06-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2017**

TENTANG

**PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI
DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
KABUPATEN CIREBON**

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Menimbang : a. Bahwa Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 2015-2020;
b. Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 2015-2020 hasil Keetapan Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdapat beberapa perubahan diantaranya tentang perubahan struktur dan komposisi pengurus DPD dan DPC Partai;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai memutuskan untuk melakukan Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Cirebon masa bakti 2015-2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
2. Anggaran Dasar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020;
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2015-2020;
4. Keetapan-keetapan Kongres IV PDI Perjuangan Tahun 2015-2020;
5. Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 26.06-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2015, tanggal 18 September 2015, tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon;
6. Peraturan DPP PDI Perjuangan Nomor 01 Tahun 2015, tanggal 12 Juni 2015, tentang Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Memerintahkan : 1. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat Nomor: 942/INDPD-10/VII/2017, tanggal 06 Juli 2017, perihal Pengantar Usulan Pengisian Jabatan Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon;
2. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Nomor: 499/INDPC/VII/2017, tanggal 03 Juli 2017, perihal Pengisian Jabatan Lowong Wakilbid. Komunikasi Politik;
3. Keputusan Rapat Pleno DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon tanggal 03 Juli 2017;
4. Keputusan Rapat Pleno DPP PDI Perjuangan.

MEMUTUSKAN...

Sekretariat : Jl. Diponegoro No. 58 Menteng, Jakarta Pusat 10310 ; Telp. : (021) 3909925 (Hunting) Fax. : (021) 3900715

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN TENTANG PENYESUAIAN STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN CIREBON**

Pertama : Mengesahkan Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

Kedua : Masa bakti Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Cirebon, terhitung sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan dilaksanakan Konferensi Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon pada Tahun 2020;

Keliga : Menugaskan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Cirebon untuk segera melaksanakan konsolidasi dan menjalankan tugas-tugas serta program partai sesuai dengan mekanisme dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan serta Peraturan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;



Keempat : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 26.06-B/KPTS-DPC/DPP/IX/2015, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;


Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diputuskan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan:
1. Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan;
2. Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Bakti 2015-2020;
3. Pengurus Anak Cabang se Kabupaten Cirebon Masa Bakti 2015-2020;
4. Bupati Kabupaten Cirebon;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 22 Juli 2017

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
MASA BAKTI 2015-2020**

Ketua Umum,  Sekretaris Jenderal, 

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  HASTO KRISTİYANTO

Lampiran: Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Nomor: 26.06-CK/PTS-DPC/DPP/VI/2017, Tanggal 22 Desember 2017

PENYESUAIAN
 STRUKTUR DAN KOMPOSISI DEWAN PIMPINAN CABANG
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 KABUPATEN CIREBON
 MASA BAKTI 2015-2020

1. KETUA	: H. MUSTOFA, S.H.
2. WAKIL KETUA BIDANG KEHORMATAN PARTAI	: TJASILA
3. WAKIL KETUA BIDANG KADERISASI DAN IDEOLOGI	: ASEP SAEFULLAH, S.Pd
4. WAKIL KETUA BIDANG ORGANISASI	: PREDI FIBRINA, S.E
5. WAKIL KETUA BIDANG PEMENANGAN PEMLU	: Drs. H. SUNJAYA PURWADI : SASTRA, M.M., M.Si
6. WAKIL KETUA BIDANG KOMUNIKASI POLITIK	: H. SUMINTA
7. WAKIL KETUA BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	: RITA KOMALA, S.H.
8. WAKIL KETUA BIDANG MARITIM	: SAWITA
9. WAKIL KETUA BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	: NINA KERISNAWATI
10. WAKIL KETUA BIDANG EKONOMI	: Hj. AMENAH, S.E
11. WAKIL KETUA BIDANG BURUH, TANI DAN NELAYAN	: BEJO KASIYONO
12. WAKIL KETUA BIDANG PEREMPUAN DAN ANAK	: RONINGSIH
13. WAKIL KETUA BIDANG PEMUDA, OLAH RAGA DAN KOMUNITAS SENI BUDAYA	: MOH. SAEFUL ADJI, S.E.
14. WAKIL KETUA BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	: YAYAT HIDAYAT
15. SEKRETARIS	: EDI MUSTOFA
16. WAKIL SEKRETARIS BIDANG INTERNAL	: RINI NOVIANTI AGUSTINI, SAB
17. WAKIL SEKRETARIS BIDANG EKSTERNAL	: DEBBI YULITA
18. BENDAHARA	: JAHARI
19. WAKIL BENDAHARA	: SUHERMAN

DEWAN PIMPINAN PUSAT
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 Masa Bakti 2015-2020

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

 HASTO KRISTİYANTO



DEWAN PIMPINAN PUSAT
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 (DPP PDI PERJUANGAN)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

- Nama : MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
 Jabatan : Ketua Umum PDI Perjuangan
 Alamat : Jl. Kebagusan Dalam IV No. 45 Rt. 010 Rw. 004, Kebagusan
 Pasar Minggu, Jakarta Selatan - DKI Jakarta
- Nama : Ir. HASTO KRISTİYANTO, M.M.
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan
 Alamat : Villa Taman Kartini Jl. Graha Asri VI Blok GIII/18 Bekasi

Masing-masing berturut-turut bertindak dalam kedudukannya sebagai KETUA UMUM dan SEKRETARIS JENDERAL, untuk dan atas nama DPP PDI Perjuangan berkedudukan di JAKARTA.

Dengan ini menyatakan bahwa tanda tangan dan cap/stempel pada surat keputusan kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut diakui dan diyakini benar adanya sesuai kehendak pimpinan/pengurus PDI Perjuangan serta menjamin dan bertanggung jawab secara hukum bahwa tanda tangan dan cap/stempel tersebut adalah sah/legal.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 November 2017

DEWAN PIMPINAN PUSAT
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
 Masa Bakti 2015 - 2020

Ketua Umum, Sekretaris Jenderal,

 MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


 HASTO KRISTİYANTO

Tembusan:
 - Arsip.

Sekretariat : Jl. P. Diponegoro No. 58 Menteng - Jakarta Pusat 10310 Indonesia, Telp. +62-21 3909925 (Hunting), Fax: +62-21 3900715
 Sekretariat : Jl. Lenteng Agung No. 99, Jakarta Selatan, Telp. +62-21 780 6028 (Hunting) Fax: +62-21 781 4472
 www.pdi-perjuangan.id sekretariat@pdiperjuangan.id



Gambar 7: AD/ART PDI-PERJUANGAN 2015-2020

 <p>PDI PERJUANGAN</p> <hr/> <p>ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA</p> <hr/> <p>PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN MASA BAKTI 2015-2020</p>	<p>62 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGAN</p> <p>BAB I NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN</p> <p>Pasal 1 Partai politik ini bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang disingkat dengan PDI Perjuangan.</p> <p>Pasal 2 PDI Perjuangan yang untuk selanjutnya disebut Partai, didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.</p> <p>Pasal 3 Dewan Pimpinan Pusat Partai berkedudukan di Jakarta atau Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Pasal 4 Wilayah Partai meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terstruktur sesuai jenjang administrasi pemerintahan dan wilayah perwakilan luar negeri yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai.</p>
<p>64 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PDI PERJUANGAN</p> <p>BAB III ARTI, TUJUAN, FUNGSI, DAN TUGAS</p> <p>BAGIAN PERTAMA ARTI PARTAI</p> <p>Pasal 6</p> <p>Partai adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">alat perjuangan guna membentuk dan membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945;alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang ber-Ketuhanan, memiliki semangat sosio nasionalisme, dan sosio demokrasi (Tri Sila);alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Eka Sila);wadah komunikasi politik, mengembangkan dan memperkuat partisipasi politik warga negara; danwadah untuk membentuk kader bangsa yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;	<p>65 ANGGARAN DASAR</p> <p>BAGIAN KEDUA TUJUAN PARTAI</p> <p>Pasal 7</p> <p>Partai mempunyai tujuan umum:</p> <ol style="list-style-type: none">mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika; danberjuang mewujudkan Indonesia sejahtera berkeadilan sosial yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. <p>Pasal 8</p> <p>Partai mempunyai tujuan khusus:</p> <ol style="list-style-type: none">membangun gerakan politik yang bersumber pada kekuatan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan berkeadilan sosial;membangun semangat, mengkonsolidasi kemauan, mengorganisir tindakan dan kekuatan rakyat, mendidik dan menuntun rakyat untuk membangun kesadaran politik dan mengolah semua tenaga

rakyat dalam satu gerakan politik untuk mencapai kemerdekaan politik dan ekonomi;

- c. memperjuangkan hak rakyat atas politik, ekonomi, sosial dan budaya, terutama demi pemenuhan kebutuhan absolut rakyat, yaitu kebutuhan material berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan spiritual berupa kebudayaan, pendidikan dan kesehatan;
- d. berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional sebagai alat untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; dan
- e. menggalang solidaritas dan membangun kerjasama internasional berdasarkan spirit Dasa Sila Bandung dalam upaya mewujudkan cita-cita Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

BAGIAN KETIGA FUNGSI PARTAI

Pasal 9

Partai mempunyai fungsi:

- a. mendidik dan mencerdaskan rakyat agar bertanggung jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara;
- b. melakukan rekrutmen anggota dan kader Partai untuk ditugaskan dalam struktural Partai, Lembaga-Lembaga Politik dan Lembaga-Lembaga Publik;
- c. membentuk kader Partai yang berjiwa pelopor, dan memiliki pemahaman, kemampuan menjabarkan dan melaksanakan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. menghimpun, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan pemerintahan negara;
- e. menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan rakyat guna membangun dan mencapai cita-cita masyarakat Pancasila; dan
- f. membangun komunikasi politik berlandaskan hakekat dasar kehidupan berpolitik, serta membangun partisipasi politik warga negara.

BAGIAN KEEMPAT TUGAS PARTAI

Pasal 10

Partai mempunyai tugas:

- a. mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mempertahankan, menyebarkan dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, tujuan berbangsa dan bernegara;
- c. menjabarkan, menyebarkan dan membunikan ajaran Bung Karno dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. menghimpun dan memperjuangkan aspirasi rakyat berdasarkan ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai;
- e. memperjuangkan kebijakan politik Partai menjadi kebijakan politik penyelenggaraan Negara;
- f. mempersiapkan kader Partai sebagai petugas Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik;
- g. mempengaruhi dan mengawasi jalannya penyelenggaraan negara agar senantiasa berdasarkan pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945

dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta jalan TRISAKTI sebagai pedoman strategi dan tujuan kebijakan politik Partai demi terwujudnya pemerintahan yang kuat, efektif, bersih dan berwibawa;

- h. sebagai poros kekuatan politik nasional wajib berperan aktif dalam menghidupkan spirit Dasa Sila Bandung untuk membangun konsolidasi dan solidaritas antar bangsa sebagai bentuk perlawanan terhadap liberalisme dan individualisme.

BAB IV KEANGGOTAAN

BAGIAN PERTAMA REKRUTMEN, JENIS DAN BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 11 Rekrutmen

- (1) Partai melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi anggota Partai.
- (2) Setiap orang dapat mendaftarkan diri sebagai anggota Partai dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Partai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 12 Jenis Keanggotaan

- (1) Anggota Partai adalah Warga Negara Indonesia yang secara sukarela menyatakan diri untuk menjadi anggota dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai anggota.
- (2) Anggota Partai terdiri atas:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota;
 - c. Kader; dan

- d. Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota Partai mempunyai hak dan kewajiban.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 13 Anggota Biasa Partai

- (1) Anggota Biasa Partai adalah Warga Negara Indonesia yang telah mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan Partai serta dinyatakan diterima sebagai Anggota Biasa Partai oleh Pimpinan Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat menjadi Anggota Biasa Partai dan Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14 Anggota Partai

- (1) Anggota Partai adalah Anggota Biasa Partai yang telah mengikuti pelatihan, pendidikan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan, pendidikan dan pembinaan Anggota Biasa Partai menjadi Anggota Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Kader Partai

- (1) Kader Partai adalah Anggota Partai yang telah dinyatakan lulus dari pendidikan kader Partai dan/ atau telah teruji dedikasi, loyalitas, dan pengabdianya kepada Partai dan masyarakat umum.
- (2) Jenjang Kader Partai adalah:
 - a. Kader Pratama;
 - b. Kader Madya; dan
 - c. Kader Utama.
- (3) Di luar jenjang kader sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai mempersiapkan Warga Negara Indonesia yang memiliki kecakapan profesional tertentu untuk ditetapkan sebagai Anggota Partai dalam rangka ditugaskan pada lembaga politik dan lembaga publik serta kelembagaan yang bersifat strategis lainnya, setelah mengikuti Sekolah Partai atau pendidikan kader yang bersifat khusus.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kader Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 16
Anggota Kehormatan

- (1) Anggota Kehormatan Partai adalah Warga Negara Indonesia yang berjasa luar biasa kepada Partai dan

pandangan serta sikap hidupnya tidak bertentangan dengan Asas, Jati Diri, Watak, dan Tujuan Partai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, pengusulan, dan penetapan Anggota Kehormatan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEDUA
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Paragraf Pertama
Hak Anggota

Pasal 17

Setiap Anggota Partai berhak:

- a. mendapat perlakuan yang sama di dalam Partai;
- b. menghadiri rapat-rapat Partai yang secara khusus mengundang Anggota Partai dan/atau rapat terbuka Partai;
- c. menyampaikan aspirasi dan pendapat kepada Partai, secara tertulis maupun lisan;
- d. menggunakan hak bicara dalam rapat;
- e. mendapatkan hak memilih dan dipilih; dan
- f. memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Partai.

Paragraf Kedua Kewajiban Anggota

Pasal 18

Anggota Partai mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi dan Tujuan Partai;
- b. melaksanakan Asas, Jati Diri, Watak, Fungsi, Tujuan dan kebijakan Partai;
- c. mentaati peraturan dan keputusan Partai;
- d. menjaga nama baik dan kehormatan Partai;
- e. menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Partai dengan penuh tanggung jawab;
- f. membayar iuran wajib Partai; dan
- g. melakukan rekrutmen anggota baru.

BAGIAN KETIGA PENUGASAN ANGGOTA PARTAI

Pasal 19

Penugasan di Luar Struktur dan Alat Kelengkapan

- (1) Anggota Partai dapat ditugaskan dan melakukan kegiatan atas nama Partai di luar struktur dan alat kelengkapan Partai sepanjang tidak bertentangan dengan asas, fungsi dan tujuan Partai.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan anggota di luar struktur dan alat kelengkapan Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

Penugasan dalam Jabatan Politik dan Jabatan Publik

- (1) Partai menugaskan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik.
- (2) Setiap Anggota Partai yang terpilih dan duduk dalam jabatan politik dan jabatan publik adalah petugas partai yang harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan perintah Partai sesuai tingkatannya.
- (3) Penempatan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik dilakukan melalui suatu proses seleksi dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan publik diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KEEMPAT DISIPLIN PARTAI

Pasal 21

- (1) Setiap Anggota Partai wajib mentaati Disiplin Partai.
- (2) Terhadap pelanggaran Disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai.

BAB V ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA STRUKTUR PIMPINAN DAN PENGURUS PARTAI

Pasal 26

Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota;
- d. Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri;
- e. Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya;
- f. Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara;
- g. Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya; dan
- h. Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/ RW atau sebutan lainnya.

BAB V ORGANISASI

BAGIAN PERTAMA STRUKTUR PIMPINAN DAN PENGURUS PARTAI

Pasal 26

Struktur Pimpinan dan Pengurus Partai secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Dewan Pimpinan Pusat Partai disingkat DPP Partai di tingkat nasional;
- b. Dewan Pimpinan Daerah Partai disingkat DPD Partai di tingkat provinsi;
- c. Dewan Pimpinan Cabang Partai disingkat DPC Partai di tingkat kabupaten/kota;
- d. Dewan Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat DPLN Partai di luar negeri;
- e. Pengurus Anak Cabang Partai disingkat PAC Partai di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya;
- f. Pengurus Perwakilan Luar Negeri Partai disingkat PPLN Partai di negara bagian/provinsi atau sebutan lain di suatu negara;
- g. Pengurus Ranting Partai di tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya; dan
- h. Pengurus Anak Ranting Partai di tingkat dusun/dukuh/kampung/ RW atau sebutan lainnya.

BAGIAN KETUJUBELAS LEMBAGA SOSIAL EKONOMI KEMASYARAKATAN

Pasal 67

- (1) DPP Partai dapat membentuk yayasan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan guna melaksanakan program kerakyatan Partai.
- (2) Pembentukan yayasan dan lembaga-lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Partai.

BAGIAN KEDELAPANBELAS URUTAN DAN JENJANG RAPAT

Pasal 68

- (1) Urutan dan jenjang rapat-rapat Partai bersifat hierarkis.
 - (2) Rapat-rapat terdiri dari:
 - a. Rapat di tingkat Pusat;
 - b. Rapat di tingkat Provinsi;
 - c. Rapat di tingkat Kabupaten/Kota;
 - d. Rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri;
 - e. Rapat di tingkat Kecamatan;
 - f. Rapat di tingkat Ranting; dan
 - g. Rapat di tingkat Anak Ranting.
 - (3) Rapat tingkat Pusat terdiri dari:
 - a. Kongres;
 - b. Rapat DPP Partai;
 - c. Rapat Kerja Nasional;
-

- d. Rapat Koordinasi Nasional;
 - e. Rapat Koordinasi Bidang Nasional; dan
 - f. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Nasional.
- (4) Rapat-rapat di tingkat provinsi terdiri dari:
- a. Konferensi Daerah;
 - b. Rapat DPD Partai;
 - c. Rapat Kerja Daerah;
 - d. Rapat Koordinasi Daerah;
 - e. Rapat Koordinasi Bidang Daerah; dan
 - f. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Daerah.
- (5) Rapat-rapat di tingkat kabupaten/kota terdiri dari:
- a. Konferensi Cabang;
 - b. Rapat DPC Partai;
 - c. Rapat Kerja Cabang;
 - d. Rapat Koordinasi Cabang; dan
 - e. Rapat Tiga Pilar Partai tingkat Cabang.
- (6) Rapat-rapat di tingkat Perwakilan Luar Negeri terdiri dari:
- a. Konferensi Perwakilan Luar Negeri;
 - b. Rapat DPLN Partai; dan
 - c. Rapat PPLN Partai.
- (7) Rapat-rapat di tingkat Kecamatan terdiri dari:
- a. Musyawarah Anak Cabang Partai; dan
 - b. Rapat PAC Partai.

- (8) Rapat-rapat di tingkat Ranting terdiri dari:
 - a. Musyawarah Ranting Partai; dan
 - b. Rapat Pengurus Ranting Partai.
- (9) Rapat-rapat di tingkat Anak Ranting terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anggota Anak Ranting Partai; dan
 - b. Rapat Pengurus Anak Ranting Partai.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KESEMBILANBELAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Pasal 69

- (1) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat Partai wajib dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kepemimpinan partai satu tingkat di atasnya.

- (8) Rapat-rapat di tingkat Ranting terdiri dari:
 - a. Musyawarah Ranting Partai; dan
 - b. Rapat Pengurus Ranting Partai.
- (9) Rapat-rapat di tingkat Anak Ranting terdiri dari:
 - a. Musyawarah Anggota Anak Ranting Partai; dan
 - b. Rapat Pengurus Anak Ranting Partai.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai rapat-rapat Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

BAGIAN KESEMBILANBELAS PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

Pasal 69

- (1) Pengambilan keputusan dalam setiap rapat-rapat Partai wajib dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan dilaksanakan dengan sistem perwakilan untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada kepemimpinan partai satu tingkat di atasnya.

Pasal 74
Konferensi Cabang

- (1) Konferensi Cabang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh utusan-utusan PAC Partai serta Peninjau dan undangan yang ditetapkan DPC Partai;
- (2) Konferensi Cabang Partai dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (3) Konferensi Cabang Partai mempunyai wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban DPC Partai; dan
 - b. merumuskan program kerja Partai di tingkat kabupaten/kota;
 - c. membentuk DPC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 75
Rapat DPC Partai

- (1) Rapat DPC Partai terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno; dan
 - b. Rapat Bidang.
- (2) Pengambilan keputusan di dalam setiap rapat DPC Partai dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat DPC Partai diatur dalam Anggaran RumahTangga Partai.

Pasal 76
Musyawarah Anak Cabang

- (1) Musyawarah Anak Cabang merupakan kekuasaan tertinggi dalam Partai ditingkat Kecamatan atau sebutan lain yang dihadiri oleh utusan-utusan Ranting Partai.

- (2) Musyawarah Anak Cabang dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali atau dalam periode tertentu sesuai Peraturan Partai.
- (3) Musyawarah Anak Cabang Partai mempunyai wewenang:
 - a. menilai laporan pertanggungjawaban PAC Partai;
 - b. merumuskan program kerja Partai di tingkat PAC Partai; dan
 - c. membentuk PAC Partai.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Anak Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

Pasal 77
Rapat PAC Partai

- (1) Rapat PAC Partai merupakan rapat para pengurus PAC Partai yang diselenggarakan secara rutin untuk membahas pelaksanaan program Partai yang ditetapkan oleh DPC Partai.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat PAC Partai diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Partai.

CURICULUM VITAE



Nama : Jaisy Muhammad
TTL : Cirebon, 15 Februari 2001
Alamat : Griya Mukti Asri B1 No. 10 RT 01 RW 05 Desa
Kedungdawa Kec. Kedawung, Kab. Cirebon
NIM : 1906016073
Jurusan : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
IPK : 3.63
E-mail : jaisymuh73@gmail.com
HP : 085172146818

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDSI Al-Farabi Cirebon
2. SMPIT Nurul Islam Tenganan
3. SMA N 1 Sumber
4. S1 Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

RIWAYAT ORGANISASI

1. Kepala Divisi PSDM Young Islamic Leader 2019-2020
2. Anggota Kementerian Sosial Politik DEMA FISIP 2021
3. Menteri Sosial Politik DEMA FISIP 2022
4. Menteri Kajian Aksi & Propaganda DEMA UIN Walisongo 2023